



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2023

DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Samarinda, Juni 2019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	26
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	66
Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	68
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	68
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	77
3.3. Hasil Telaahan Renstra K/L	85
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	93
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	94
Bab IV Tujuan Dan Sasaran	97
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	97
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	99
5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.....	99

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	103
6.1. Program Perangkat Daerah Dinas Perhubungan	
Prov. Kalimantan Timur	103
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	107
Bab VIII Penutup	108
8.1. Kesimpulan	108
8.2. Saran	108

Kata Pengantar

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta menetapkan Renstra SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD 2019 – 2023 oleh karena itu setiap SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra SKPD.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 hendaknya dapat merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut diprediksi akan melatarbelakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan dan berbasis kinerja.

Meskipun terjadi berbagai perubahan lingkungan strategis, perencanaan pembangunan perhubungan, senantiasa tetap berpegang pada pendekatan kesisteman agar pembangunan perangkat keras (*hardware*) seiring, sejalan dan terpadu dengan pembangunan perangkat lunak (*software*) serta pengembangan sumber daya manusia (*brainware*).

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023.

Dengan telah selesainya penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023, harapan kami pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dan operasional Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dapat searah, sejalan, selaras dan berkesinambungan dengan Dokumen RPJP Provinsi Kalimantan Timur serta Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

Samarinda, Juni 2019

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Timur



Ir. H. Salman Lumoindong, MM

Pembina Utama Madya (IV/d)

Nip. 19600107 198903 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari kebijakan Pembangunan Nasional, yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera yang berkeadilan. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan yang ada di daerah harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan Nasional, sehingga mampu menjamin kesesuaian pelaksanaan pembangunan, baik antar daerah/wilayah maupun antar sektor.

Kondisi perekonomian masyarakat Kalimantan Timur saat masih belum stabil dan saat ini diperparah oleh dampak krisis global, sehingga angka kemiskinan, jumlah pengangguran dan lemahnya kemampuan berkompetisi dalam skala global perlu menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan pembangunan, sehingga secara bertahap dan sistematis dapat ditangani. Kegiatan pembangunan bidang perhubungan mempunyai peranan yang cukup signifikan terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan dan mendorong upaya pemerataan dan laju pembangunan daerah.

Upaya menggali potensi sumber daya yang ada di berbagai daerah, pengembangan sentra-sentra produksi dan pemenuhan terhadap kebutuhan pasar tentunya harus didukung oleh infrastruktur dan sistem transportasi yang memadai dan efisien, sehingga kegiatan ekonomi wilayah menjadi lebih kompetitif. Oleh karena itu konsep perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah, termasuk bidang perhubungan harus terintegrasi dengan konsep pembangunan sektor-sektor lainnya, misalnya sektor

pertanian, pertambangan, industri dan perdagangan, sehingga akan mampu membangun sinergi bagi upaya memacu laju pembangunan daerah.

Rencana strategi (RENSTRA) Pembangunan Provinsi harus mampu mengintegrasikan seluruh perencanaan dan program pembangunan, yang kemudian dijabarkan pada masing-masing sektor dan atau lembaga sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Secara yuridis formal, integrasi RENSTRA Pembangunan dalam skala Nasional dan Daerah ini telah tertuang dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RENSTRA Pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan peraturan perundangan tersebut, disusun mengacu pada keselarasan program-program prioritas yang mendukung upaya penyelesaian program strategis nasional yang termuat di Renstra Kementerian Perhubungan RI dan keterkaitan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur sesuai Perda Nomor : 02 Tahun 2019, yang memuat konsep, kebijakan dan program pembangunan bidang Perhubungan.

Mengingat kegiatan pembangunan bidang perhubungan tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah, tetapi juga melibatkan dunia usaha (swasta) dan masyarakat, maka kebijakan dan program pembangunan yang tertuang dalam RENSTRA harus memberi ruang yang cukup bagi partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Hal ini menjadi sangat penting ketika kemampuan dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah terbatas. Seiring dengan tuntutan agar pemerintah lebih efektif dan efisien di satu sisi dan di sisi lain pihak dunia usaha dan masyarakat dapat berperan lebih besar dalam berbagai kegiatan pembangunan, maka pemerintah

(baik pusat maupun daerah) harus lebih memantapkan fungsinya sebagai regulator, fasilitator dan controller sehingga pengendalian pembangunan dan pelayanan umum kepada masyarakat tetap terjaga.

Sesuai Peraturan Kementerian Dalam Negeri RI, Nomor : 86 Tahun 2017, Rencana Strategis SKPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan SKPD, penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi program Gubernur dan Wakil Gubernur, telaahan hasil evaluasi Renstra lima tahun sebelumnya, dan telaahan RPJMD.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019-2023 disusun berdasarkan ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 16. Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2019 tentang RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

18. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan adalah menyusun agenda perencanaan pembangunan bidang Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur yang dituangkan dalam Dokumen RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DINAS PERHUBUNGAN Provinsi Kalimantan Timur untuk rentang waktu implementasi perencanaan tahun 2019-2023.

Sedangkan tujuan dari kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur ini adalah :

1. Mengidentifikasi potensi, sumber daya dan permasalahan pembangunan bidang perhubungan ;
2. Merumuskan kebijakan, arah dan tujuan dan strategi pembangunan Bidang Perhubungan ;
3. Mengakomodasikan seluruh aspirasi yang berkembang baik dari lembaga pemerintah, asosiasi profesi, dan masyarakat umum ;
4. Menetapkan hasil kegiatan penelitian ini sebagai kebijakan pembangunan Bidang Perhubungan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017, sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota, juga memuat landasan hukum, maksud dan tujuan Renstra Perangkat Daerah serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini memuat informasi tentang peran (Tugas dan Fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah.

Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bagian ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah sekaligus Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bagian ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah, indikator tujuan dan sasaran serta target kinerja tujuan/sasaran pada tahun berjalan sampai dengan lima tahun kedepan.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bagian ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, juga akan menjelaskan relevansi dan konsistensi antar pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode 2019-2023, berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagaimana amanat yang tertuang didalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, dinyatakan bahwa penyelenggaraan transportasi merupakan urat nadi pembangunan bangsa. Hal ini dapat disadari, bahwa penyelenggaraan transportasi erat terkait dan melekat dengan sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya bangsa. Oleh karenanya penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan memiliki sensitifitas tinggi serta memiliki nilai manfaat berganda (multiplier effect) terhadap pembangunan perekonomian masyarakat.

Menyadari kedudukan dan peranannya yang sangat strategis itu, yaitu sebagai faktor pendorong, penunjang dan pendukung pembangunan, maka penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan diharapkan mampu secara effect langsung (direct effect) dan effect tidak langsung (indirect effect) memberikan stimulus dan manfaat ekonomi (economic benefit) yang tinggi. Demikian juga sebaliknya harus mampu mengeliminasi dampak samping operasional transportasi jalan yang dapat menimbulkan beban dan biaya ekonomi tinggi (high cost ekonomi).

Oleh karenanya didalam Rancangan Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, penyelenggaraan pembangunan bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan ditetapkan sebagai bagian kegiatan dalam menunjang pencapaian perwujudan salah satu kebijakan utama pembangunan Kalimantan Timur, yaitu dalam hal

pencapaian perwujudan kebijakan pemulihan ekonomi dan peningkatan produktivitas melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, penguatan unit usaha dan lembaga-lembaga ekonomi.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Urusan Wajib Pemerintahan di Bidang Perhubungan

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016, maka pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Sub Urusan Bidang Lalu Lintas, Kewenangan:

- a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi.
- b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi
- c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B
- d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Provinsi
- e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Provinsi
- f. Audit dan Inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi
- g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- h. Penetapan kawasan perKotaan untuk pelayanan angkutan PerKotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota dalam 1(satu) Provinsi;
- i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi dan perKotaan yang melampaui batas 1(satu) daerah Kabupaten/Kota;

- j. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten dalam 1(satu) Daerah Provinsi;
- k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perKotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah Kota/Kabupaten dalam 1(satu) daerah Provinsi;
- l. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang, dalam Trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang Melayani trayek antarKota dalam daerah Provinsi serta Angkutan perKotaan dan pedesaan yang melampaui Kab/Kota dalam 1 daerah Provinsi;

2. Sub Urusan Bidang Pelayaran, Kewenangan :

- a. Penertiban izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi;
- b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi, pelabuhan antar-daerah Provinsi , dan pelabuhan internasional;
- c. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-

Daerah Kabupaten / Kota dalam daerah Provinsi yang bersangkutan;

- d. Penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah Kab/Kota dalam daerah Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api Provinsi;
- e. Penetapan lintas penyebrangan dan persetujuan pengoperasian kapal yang melayani penyebrangan lintas pelabuhan antar daerah Kab/Kota dalam 1(satu) daerah Provinsi.
- f. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.
- g. Penetapan tarif angkutan penyebrangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyebrangan antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi;
- h. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpul regional;
- i. Pembangunan, Penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpul regional;
- j. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) daerah Provinsi;
- k. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul regional;
- l. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan pengumpan regional;

- m. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
- n. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- o. Penertiban izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- p. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan regional.

3. Sub Urusan Bidang Perkeretapian, Kewenangan :

- a. Penetapan rencana induk perkeretapian Provinsi ;
- b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah Kab/Kota;
- c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 daerah Kab/Kota dalam Provinsi ;
- d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Provinsi ;
- e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerahn Provinsi ;
- f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretapian pada jaringan jalur perkeretapian Provinsi ;
- g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ;

2.1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

Merujuk Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2016, Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
- c. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Provinsi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk Pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor : 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, struktur Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

- Subbag Perencanaan Program dan Keuangan
- Subbag Umum

2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Seksi Lalu Lintas Jalan
- Seksi Angkutan Jalan
- Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana

3. Bidang Pelayaran

- Seksi Kepelabuhanan
- Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran
- Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

4. Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian

- Seksi Perkeretaapian
- Seksi Lingkungan Perhubungan
- Seksi Keterpaduan Antar Moda dan Teknologi Perhubungan

5. UPTD Terminal Type B

- Subbag Tata Usaha
- Seksi Operasional I
- Seksi Operasional II

2.1.2.1. Tugas dan Fungsi Sekretariat

1. Tugas

Melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas Perhubungan Provinsi;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. Penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretaris dibantu 2 Kasubbag yaitu Kasubbag Perencanaan, program keuangan dan Kasubbag Umum dengan tugas sebagai berikut :

A). Tugas Sub. Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan

Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan, anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan asset.

B). Tugas Sub. Bagian Umum

Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian,

ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

2.1.2.2. Tugas dan fungsi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan dan Angkutan Jalan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang LLAJ dibantu 3 Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :

A) Tugas Seksi Lalu Lintas Jalan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian lalu lintas jalan dan mengevaluasi

pelaksanaan kegiatan Seksi Lalu Lintas Jalan pada jalan jalan Provinsi dan mengusulkan kebutuhan pada jalan jalan Nasional.

B) Tugas Seksi Angkutan Jalan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian angkutan jalan.

C) Tugas Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian keselamatan, sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

2.1.2.3. Tugas Dan Fungsi Bidang Pelayaran

1. Tugas

Melaksanakan koordinasi , Pembinaan dan Pengendalian teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas, penyiapan penetapan lokasi, pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan lalu lintas angkutan laut wilayah laut Provinsi, pengendalian dan pengawasan pengelolaan pelabuhan Provinsi, dan penetapan lintas penyebrangan dalam Provinsi, serta pengendalian operasional lalu lintas angkutan laut,sungai, danau dan penyebrangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait

angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan;

- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pelayaran dibantu 3 Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :

A) Tugas Seksi Kepelabuhanan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kepelabuhanan..

B) Tugas Seksi Badan Usaha & Jasa Terkait Angkutan Pelayaran

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran.

C) Tugas Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan

penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP.

2.1.2.4. Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian

1. Tugas

Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian di Kabupaten / Kota sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil, Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan.

2. Fungsi

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perkeretaapian, lingkungan perhubungan, dan pepaduan moda dan teknologi perhubungan.
- b. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program peningkatan perkeretaapian, lingkungan perhubungan, dan pepaduan moda dan teknologi perhubungan.
- c. Menyiapkan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan perkeretaapian, lingkungan perhubungan, dan pepaduan moda dan teknologi perhubungan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeret Apian dibantu 3 Kepala Seksi dengan tugas sebagai berikut :

A) Tugas Seksi Perkeretaapian

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian perkeretaapian.

B) Tugas Seksi Lingkungan Perhubungan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Lingkungan Perhubungan.

C) Tugas Seksi Keterpaduan Moda & Teknologi Perhubungan

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian Keterpaduan Antar Moda dan Teknologi Perhubungan.

2.1.2.5. UPTD Terminal**1. Tugas**

Pembinaan, bimbingan, pengendalian pengawasan dan operasional terminal tipe B di Kab. Paser, Kab. Penajam Paser Utara (PPU), Kab. Kutai Barat (Kubar), Kutai Kartanegara (Kukar), Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Timur (Kutim) dan Kab. Berau. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan / pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, Melakukan monitoring dan evaluasi operasional UPTD Terminal sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil.

2. Fungsi

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dalam operasional dan pengendalian terminal tipe B di Kab. Paser, Kab. Paser Penajam Utara (PPU), Kab. Kutai Barat (Kubar), Kutai Kartanegara (Kukar), Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Timur (Kutim) dan Kab. Berau.
- b. Mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Terminal dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala UPTD Terminal Type B dibantu 1 Kasub. Tata Usaha dan 2 Kasi dengan tugas sebagai berikut :

A) Sub Bagian Tata Usaha

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar pekerjaan dapat diselesaikan baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan, rumah tangga dan kehumasan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
5. Menyiapkan bahan penyusunan kegiatan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,

ketatalaksanaan, rumah tanggadan kehumasan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan dan tertib administrasi.

6. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan, rumah tangga dan kehumasan dengan instansi terkait berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
7. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
8. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan, rumah tangga dan kehumasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas dan evaluasi selanjutnya.
9. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

B) Seksi Operasional Wilayah I

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Operasional Wilayah I berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.

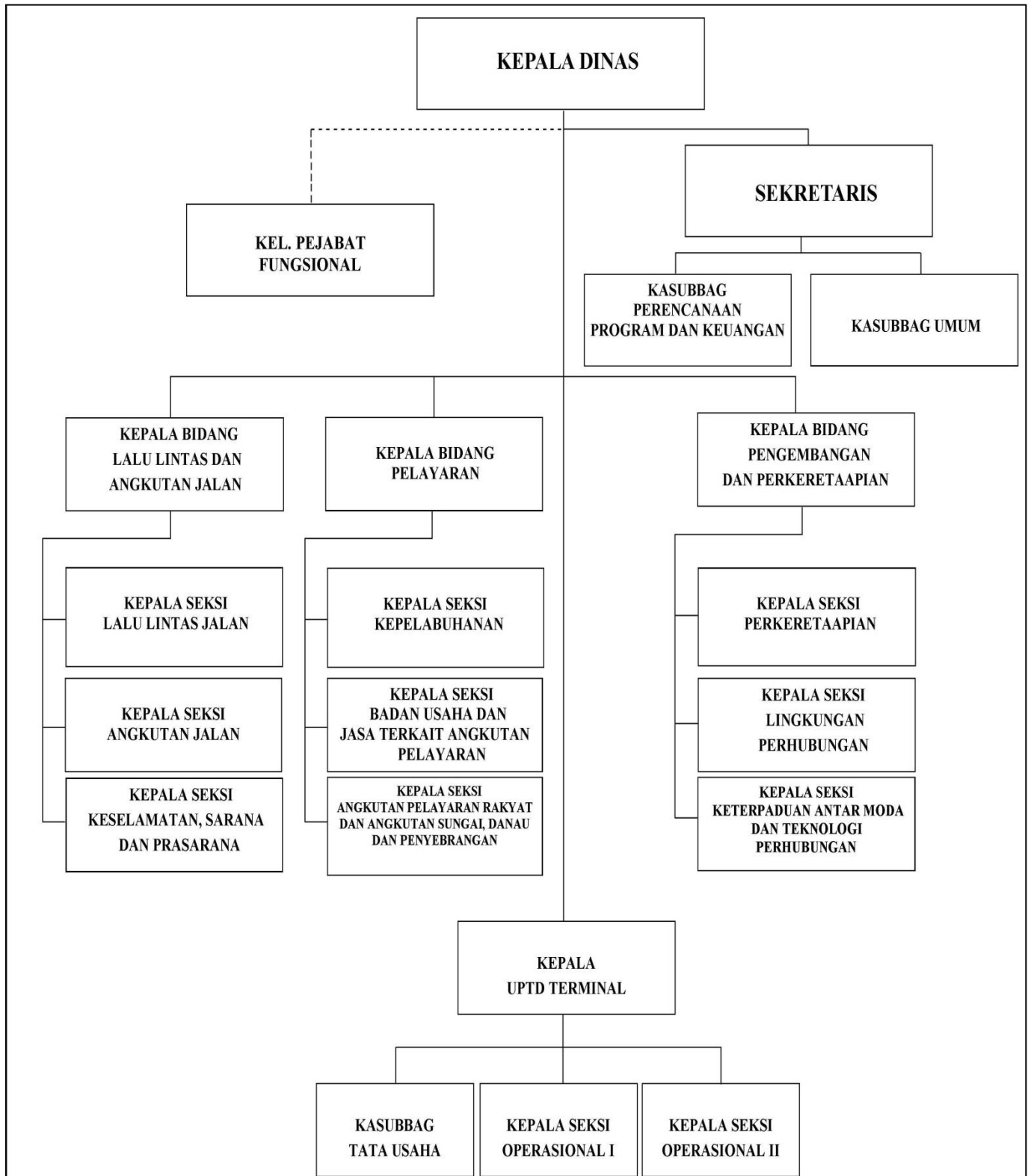
2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana.
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Operasional Wilayah I berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang operasional lapangan pada wilayah UPTD Terminal Wilayah I di Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau.
6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan operasional sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya.
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di Kabupaten / Kota Samarinda, Kota Bontang, Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

C) Seksi Operasional Wilayah II

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Operasional Wilayah II berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;

2. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
3. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
4. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Operasional Wilayah II berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
5. Melakukan pengumpulan dan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang operasional lapangan pada wilayah UPTD Terminal Wilayah II di Kab. Paser, Kab. PPU, Kutai Barat (Kubar), dan Kutai Kartanegara (Kukar);
6. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
7. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan operasional sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
8. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di Kabupaten / Kota Balikpapan, Kab. Paser, Kab. PPU, Kutai Barat (Kubar), dan Kutai Kartanegara (Kukar) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan;

**Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi
Dinas Perhubungan
Provinsi Kalimantan Timur**



2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan pada tahun 2018 seluruhnya sebanyak 135 Orang.

Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai Menurut Golongan

No	Bidang	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretariat	2	15	7	-	24
3	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3	7	2	-	12
4	Bidang Pelayaran	3	9	3	-	15
5	Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian	2	8	2	-	12
6	UPTD Terminal	2	8	20	1	31
7	Tenaga Non ASN	-	-	-	-	40
Jumlah		13	47	34	1	135

Sumber : Subbag. Kepegawaian Dishub Kaltim, Desember 2018

2.2.2 Aset yang dikelola

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa gedung kantor, kendaraan dinas, inventarisasi dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik dan beberapa dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Aset yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Neraca Aset Dinas Perhubungan Prov. Kaltim Tahun 2018

No	Nama Barang	Nilai (Rp.)
	ASET TETAP	
1.	Tanah	19.192.428.170,00
2.	Peralatan dan Mesin	27.939.309.992,00
	Alat – alat Besar	330.000.000,00
	Alat – alat Angkutan	3.986.541.759,00
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.175.037.239,00
	Alat Pertanian	42.500,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.307.643.630,98
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	2.415.789.667,27
	Alat Laboratorium	1.283.030.795,75
	Alat – alat Persenjataan/Keamanan	6.441.224.400,00
3.	Gedung dan Bangunan	42.347.791.165,00
	Bangunan Gedung	29.176.416.440,00
	Monumen	13.171.374.725,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.751.692.373,00
	Jalan dan Jembatan	25.658.967.373,00
	Bangunan Air/Irigasi	92.725.000,00
	Jaringan	201.922.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	759.285.125,00
	Buku dan Perpustakaan	653.814.925,00
	Aset Renovasi	105.470.200,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	537.963.698.258,00
7.	ASET LAINNYA	1.806.178.000,00
	Aset Lainnya	1.806.178.000,00
	Aset Tidak Berwujud	1.806.178.000,00

Aset Dinas Perhubungan terdiri dari aset yang ada di Jembatan Timbang, Pelabuhan Penyeberangan Kariangau dan Pelabuhan Maloy serta beberapa Bandara yang akan dan telah diserahterimakan ke pihak ke-tiga (UPBU Kementerian Perhubungan), rincian barang ke neraca terlampir.

Khusus prasarana kendaraan dinas/operasional di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Komposisi Kendaraan Dinas/Operasional R4 dan R2

No	Jenis/Merk Kendaraan	No. Polisi	Tahun Pembuatan	Kondisi
A	KENDARAAN R 4			
1	Pick up/Ranger	KT 8473 B	2005	Baik
2	Double Cabin/Mitsubishi	KT 8494 B	2002	Baik
3	Minibus/Toyota Kijang	KT 1273 DZ	2003	Baik
4	Minibus/Isuzu TBR	KT 2369 BZ	2003	Baik
5	Minibus/Isuzu Touring	KT 1907 B	2003	Baik
6	Minibus/Isuzu TBR	KT 2401 BZ	2003	Baik
7	Double Cabin/Mitsubishi	KT 1902 B	2003	Baik
8	Minibus/Toyota Kijang	KT 1782 B	2003	Baik
9	Minibus/Toyota Kijang	KT 2408 BZ	2003	Baik
10	Minibus/Ford Everest	KT 1369 BZ	2004	Baik
11	Minibus/toyota avanza	KT 2758 BZ	2005	Baik
12	Minibus/Isuzu MR	KT 9100 B	2005	Baik
13	Minibus/Toyota Avanza	KT 1015 BZ	2008	Baik
14	Minibus/Toyota Avanza	KT 1014 BZ	2008	Baik
15	Bus/Isuzu NHR	KT 9065 B	2005	Baik
16	Minibus/Suzuki APV	KT 1564 BZ	2010	Baik
17	Minibus/Toyota Kijang	KT 2790 BZ	2003	Baik
18	Jeep/Toyota Fortuner	KT 1716 BC	2011	Baik
19	Pick Up/Suzuki Mega Carry Extra	KT. 8879 BZ	2012	Baik

B	KENDARAAN R2			
1	Sepeda motor/Yamaha 5 LM	KT 5730 B	2002	Baik
2	Sepeda Motor/Honda NF 100 D	KT 4759 M	2003	Baik
3	Sepeda Motor/Honda NF 125 D	KT 4102 MZ	2005	Baik
4	Sepeda Motor/Honda NF 125 TD	KT 4698 MZ	2008	Baik
5	Sepeda Motor/Honda NF 125 TD	KT 4699 MZ	2008	Baik
6	Sepeda Motor/HondaGL 160 D	KT 4819 MZ	2009	Baik
7	Sepeda Motor/Honda NC11B1C	KT 4818 MZ	2009	Baik
8	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3938 B	2010	Baik
9	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3935 B	2010	Baik
10	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3932 B	2010	Baik
11	Sepeda Motor/Honda GLP III	KT 4012 MZ	2004	Baik
12	Sepeda Motor/Honda NF 125 TR	KT 3252 M	2011	Baik
13	Sepeda Motor/Honda NF 125 RR	KT 3245 M	2011	Baik
14	Sepeda Motor/Honda NF 100 TD	KT 4286 M	2002	Baik
15	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3429 MZ	2012	Baik
16	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3430 MZ	2012	Baik
17	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3431 MZ	2012	Baik
18	Sepeda Motor/Honda NF12A1CF1	KT 3432 MZ	2012	Baik

Sumber : Database Sub.Bagian Umum Dishub Prov. Kaltim Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah kendaraan operasional yang terdapat di Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur 19 kendaraan roda empat dan 18 kendaraan roda dua kendaraan dan dalam keadaan baik.

Tabel. 2.5
Luas Bangunan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

NO	NAMA BANGUNAN	LUAS BANGUNAN (M ²)	JML LANTAI	LUAS KESELURUHAN (M ²)
1	Bangunan Induk	2,950	2	5,900
2	Gedung Koperasi	180	1	180
3	Gedung Dharma Wanita	419	1	419
4	Musholla	157	1	157
5	Kantin lama	32	1	32
6	Bangunan baru	202	2	404
	LUAS KESELURUHAN			7,092

Sumber: Subbag Umum Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa luas keseluruhan pada kantor Dinas Perhubungan Prov. Kaltim adalah seluas 7.092 M².

Untuk komposisi peralatan dan perlengkapan kantor utama yang digunakan dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2.6. Komposisi Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur**

No	Jenis Asset	Jumlah/ Satuan	Kondisi		Lokasi	Ket
			Baik	Rusak		
1	Personal Komputer	72 Unit	46	26	Samarinda	
2	Printer	67 Unit	33	34	Samarinda	
3	Laptop	30 Unit	13	17	Samarinda	
4	AC	49 Unit	33	16	Samarinda	
6.	Genset	1 Unit	1		Samarinda	

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Perhubungan Prov. Kaltim 2018

Sedangkan unit usaha di Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur yang sampai saat ini masih operasional adalah Koperasi Panca Citra Dishub dengan kepengurusan sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Nomor : SK. 860/0219/KPN-Dishub/IX/2017 tanggal 11 September 2017

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dishub Prov. Kaltim Tahun 2013-2018 (TC.23) dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja SKPD	Satuan	Kondisi Awal	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi	Angka	65	67	68,00	68	68,19	68,50	68,54	70	71,16	71,50	72	74	76,60
2	Prosentase penurunan jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan Angkutan Bus Umum	Angka	-4	-4	-5,45	-3,5	-5,14	-3	-4,84	-2	-4,76	-2	8,7	-2	1
3	Prosentase kesesuaian waktu tempuh rerata per 100 Km Angkutan AKDP pada Kartu Pengawasan (KPS) terhadap kondisi lapangan	%	72%	75%	75%	76%	78%	78%	80%	80%	98%	85%	98%	85%	98%
4	Prosentase Kab/Kota berpredikat WTN	%	40%	40%	40%	50%	40%	70%	50%	80%	70%	90%	70%	90%	80%
5	Prosentase kendaraan tidak melanggar muatan lebih	%	65%	65%	99,94%	67%	99,88%	68%	99,19%	70%	98,33%	75%	98,50%	80%	95%
6	Prosentase peningkatan jumlah SDM yang berkompetensi teknis	%	10%	65%	15%	68%	18%	70%	20%	75%	20,37%	80%	29%	80%	35%

7	Prosentase Kelulusan Taruna yang Bersertifikasi Pelaut	%	15%	70%	18%	80%	31,46%	90%	52,63%	100%	71,43%	100%	75%	100%	100%
8	Prosentase pertumbuhan Jml penumpang angkutan darat terminal type B	%	-	-	-	-	-	-	-	10%	8%	10%	8%	10%	8%
9	Prosentase Ketersediaan terminal tipe B	%	-	-	-	-	-	-	-	80%	70%	80%	70%	80%	70%
10	Prosentase pertumbuhan jumlah penumpang pelabuhan laut	%	6%	6%	0,18%	8%	18,56%	10%	8,38%	12%	-28,30%	12%	-10.50%	12%	12%
11	Prosentase Ketersediaan pelabuhan laut	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	100%	100%
12	Prosentase pertumbuhan jumlah penumpang angkutan udara	%	5%	6%	1,33%	8%	-12,88%	10%	6,31%	15%	8,66%	10%	6,31%	15%	8,66%
13	Prosentase ketersediaan bandar udara	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Prosentase pertumbuhan jumlah penumpang angkutan SDP	%	10%	12%	7,31%	15%	16,27%	17%	-9,37%	20%	0,20%	5,00%	3.50%	5.00%	4.55%
15	Prosentase ketersediaan dermaga sungai dan penyeberangan	%	80%	75%	80%	80%	80%	75%	80%	80%	85%	80%	75%	80%	80%

2.3.2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi (2013-2018) berfungsi mengukur persepsi masyarakat Kalimantan Timur terhadap kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur. Metode pengukuran Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan transportasi dititik beratkan pada pola layanan 7 Terminal Type B se Kalimantan Timur dengan menggunakan pendekatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui Survey Kepuasan dengan variable IKM sebagai berikut : 1). persyaratan pelayanan; 2). sistem, mekanisme dan prosedur, 3). Waktu penyelesaian, 4). Biaya/tariff, 5). Produk spesifikasi jenis pelayanan, 6). Kompetensi pelaksana, 7). Perilaku pelaksana, 8). Sarana dan prasarana, 9). penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan hasil IKM pertahun sebagai berikut :

- 1). Tahun 2013 : 68,00 %
- 2). Tahun 2014 : 68,19 %
- 3). Tahun 2015 : 68,54 %
- 4). Tahun 2016 : 71,16 %
- 5). Tahun 2017 : 72,00 %
- 6). Tahun 2018 : 76,60 %

Trend Indeks Layanan Transportasi cenderung mengalami peningkatan dikarenakan adanya komitmen dari para pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan/ kebijakan seiring dengan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Khusus untuk Tahun 2018 variabel unsure pelayanan yang dinilai adalah persyaratan pelayanan, system mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, Biaya/ tariff, produk spesifikasi jenis pelayananan.

(sumber : hasil survey SKM Dishub, 2018)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) periode 2014 s/d 2018

No.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	68,19	68,54	71,16	72	76,6

Sumber : Dishun Prov. Kaltim

Dari tabel diatas dapat diketahui Sistem Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Terminal Tipe B di Provinsi Kalimantan Timur dengan populasi 140 orang dan sampel 103 orang responden secara acak (tabel kreji dan Morgan), dari hasil tersebut setelah diolah data mendapatkan nilai 76,6% (B) dengan kategori Baik

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) periode 2018 s/d 2023

No.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	76,6	80,00	82,50	83,75	85,50	88,31

Sumber : Dishun Prov. Kaltim

2.3.3. Prosentase Penurunan Jumlah Kejadian Kecelakaan Yang Melibatkan Angkutan Bus Umum.

Indikator Kinerja Utama prosentase penurunan jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan Angkutan Bus Umum merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan kompetensi pengemudi angkutan umum. Indikator Kinerja Utama prosentase penurunan jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan Angkutan Bus Umum didukung oleh Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas serta 5 Kegiatan meliputi :

- 1) Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang;
- 2) Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan;
- 3) Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan;
- 4) Pengadaan rambu – rambu lalu lintas;
- 5) Forum LLAJ.

Indikator Kinerja Utama prosentase penurunan jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan Angkutan Bus Umum merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan kompetensi pengemudi angkutan umum.

Dalam perhitungan prosentase penurunan kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum yang terlibat kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2018 terhadap tahun 2017 di Kalimantan Timur.

Dengan :

$$f(x) = \frac{\Delta \text{Laka Ang Umum thn } (n-1)-n}{\sum \text{Laka Ang Umum } (n-1)} \times 100 \%$$

$f(x)$: Prosentase penurunan kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum

$\Delta \text{Laka Ang umum thn } (n-1) - n$: Selisih jumlah kendaraan angkutan umum terlibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2018 – 2017

$\sum \text{Laka Ang Umum thn } (n-1)$: Total jumlah kendaraan angkutan umum yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2018

Tabel Prosentase Kejadian Kecelakaan Angkutan Bus Umum

KENDARAAN TERLIBAT LAKA	SATUAN	TAHUN					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mobil Bus Umum	Unit	25	24	22	21	23	22
% Penurunan	%		-4,17	-9,09	-4,76	8,7	-2

Sumber : Data Laka Polda 2018

Indikator Kinerja Utama prosentase penurunan kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan bus umum terealisasi sebesar -2 (nilai negatif), menurun dari target yang ditetapkan sebesar -3, sehingga capaian Indikator Kinerja Utama prosentase penurunan kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan bus umum adalah sebesar 67 % atau tidak mencapai target sebesar 100 %. Beberapa upaya dilakukan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dalam menurunkan jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan bus umum antara lain :

- Kegiatan Forum LLAJ yang bertujuan meningkatkan kinerja sektor LLAJ di Provinsi Kalimantan Timur dan membangkitkan kesadaran semua pihak bahwa terwujudnya kondisi transportasi yang aman, selamat, tertib, lancar, nyaman dan efisien merupakan tanggung jawab bersama;
- Pada setiap tahun diadakan kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan yang merupakan pendidikan dan pelatihan yang kemudian diadakan seleksi dari 40 orang peserta yang akan diikuti di pemilihan tingkat nasional dimana dari kegiatan ini diharapkan kemampuan dan

pengetahuan mereka akan meningkat dan menjadi contoh bagi para sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum yang lain;

- c. Fasilitas dan Kelengkapan Keselamatan Jalan merupakan kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Prov. Kaltim. Pada Tahun 2018 diadakan kegiatan pengadaan rambu – rambu lalu – lintas sebanyak 356 buah yang berlokasi di Muara Badak, Samarinda, Anggana, Kariangau dan Km.13 Balikpapan dan HM. Ardan dan CCTV berjumlah 38 Unit dengan lokasi tersebar di Kaltim

Selain dari kecelakaan yang melibatkan angkutan bus umum, dari data kecelakaan lalu lintas di Kalimantan Timur menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2017 ke tahun 2018, diharapkan program – program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi dan stake holder terkait dapat menunjang sasaran meningkatnya pelayanan transportasi darat dan menurunnya angka kecelakaan khususnya pada angkutan bus umum dan umumnya pada seluruh pengguna angkutan jalan di Kalimantan Timur.

Data Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas kendaraan di Kalimantan Timur

No	Kesatuan	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018*
1	Polresta Samarinda	239	226	133	120	225	170
2	Polres Balikpapan	322	225	143	140	179	132
3	Polres Bontang	35	39	40	38	76	92
4	Polres Kukar	156	211	146	145	296	152
5	Polres Kutim	121	52	91	90	59	50
6	Polres Kubar	32	25	33	30	55	48
7	Polres Berau	119	114	48	46	85	100
8	Polres Paser	107	89	59	56	149	80
9	Polres PPU	82	60	43	40	69	44
	JUMLAH	1.213	1.041	736	705	1.193	868

Sumber : Laka Polda Tahun 2018 (*angka perkiraan Tahun 2018)

2.3.4. Prosentase kesesuaian waktu tempuh rerata per 100 Km Angkutan AKDP pada Kartu Pengawasan (KPS)

Indikator Kinerja Utama Prosentase kesesuaian waktu tempuh rerata per 100 Km Angkutan AKDP pada Kartu Pengawasan (KPS) terhadap kondisi lapangan merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dalam penentuan jam keberangkatan dan kedatangan angkutan umum sebagaimana tercantum pada Kartu Pengawasan (KPS)

Penerbitan Kartu Pengawasan (KPS) kendaraan umum AKDP merupakan salah satu tupoksi Kepala Seksi Angkutan Jalan Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dalam penyelenggaraan perizinan atau rekomendasi angkutan jalan. Dinas Perhubungan Prov. Kaltim menetapkan jam kedatangan dan keberangkatan angkutan AKDP di dalam penerbitan Kartu Pengawasan (KPS) sebagai acuan bagi pengemudi dalam memberikan pelayanan tepat waktu terhadap masyarakat. Penetapan jam kedatangan dan keberangkatan angkutan umum AKDP mempertimbangkan beberapa hal diantaranya :

1. Rata – rata waktu tempuh
2. Waktu delay akibat menaikkan dan menurunkan penumpang, hambatan samping, waktu ngetem serta kondisi kepadatan lalu – lintas pada jam tertentu.
3. Panjang lintasan jalan yang dilalui.

Pengukuran indikator prosentase kesesuaian waktu tempuh rata – rata per 100 km angkutan AKDP pada Kartu Pengawasan (KPS) terhadap kondisi lapangan pada Kartu Pengawasan hanya dilakukan pada angkutan umum AKDP dengan tingkat pelayanan ekonomi sesuai dengan kewenangan penerbitan Kartu Pengawasan (KPS) oleh Dinas Perhubungan Prov. Kaltim. Dalam pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan cara sampling, yaitu dengan memilih sampel beberapa trayek pada koridor pelayanan utama di Kalimantan Timur. Koridor utama pelayanan utama angkutan yang dipilih dalam mewakili Kalimantan Timur adalah :

1. Samarinda – Balikpapan
2. Samarinda – Tenggarong

3. Samarinda – Berau
4. Samarinda – Bontang
5. Samarinda – Sangatta
6. Samarinda – Kota Bangun
7. Samarinda – Melak
8. Balikpapan – Handil
9. Balikpapan – Bontang
10. Penajam – Tanah Grogot.

Dalam perhitungan prosentase kesesuaian waktu tempuh rata – rata per 100 Km angkutan AKDP pada Kartu Pengawasan (KPS) terhadap kondisi lapangan dilakukan dengan cara membandingkan waktu tempuh kendaraan yang tercantum pada KPS dengan standar waktu tempuh pelayanan angkutan umum di lapangan.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Prov. Kaltim tahun 2018 diperoleh data kecepatan rata- rata bagi kendaraan angkutan AKDP di 10 Koridor Utama pelayanan angkutan umum AKDP di Kalimantan Timur sebagaimana tabel berikut :

Kecepatan Rata-Rata Angkutan Umum AKDP di Kalimantan Timur

No	Koridor Utama Pelayanan Angkutan Umum AKDP	Jarak (Km)	Kecepatan Rata – Rata (Km/Jam)
1	Samarinda – Balikpapan	111	38,95
2	Samarinda – Tenggarong	45	30,00
3	Samarinda – Berau	575	37,1
4	Samarinda – Bontang	110	36,67
5	Samarinda – Sangatta	160	46,83
6	Samarinda - Kota Bangun	122	40,67
7	Samarinda – Melak	359	46,32
8	Balikpapan – Handil	96	48,00
9	Balikpapan – Bontang	230	46,00
10	Penajam - Tanah Grogot	138	46,00

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kaltim

Berdasarkan data kecepatan rata – rata tersebut diatas, maka dikonversikan menjadi waktu tempuh rata – rata per 100 km dengan rumus sebagai berikut :

$$t_1 = \frac{d}{v}$$

Dengan :

t_1 : Waktu tempuh riil atau lama perjalanan riil per 100 Km

d : Jarak perjalanan atau panjang trayek (digunakan nilai 100 Km)

v : Kecepatan rata – rata

Berdasarkan data kecepatan rata – rata tersebut maka diperoleh rata – rata waktu tempuh per 100 Km untuk kendaraan angkutan umum AKDP di Kalimantan Timur adalah sebagaimana berikut :

Waktu Tempuh per 100 Km Riil Angkutan Umum AKDP di Kaltim

No	Koridor Utama Pelayanan Angkutan Umum AKDP	Jarak (Km)	Kecepatan Rata – Rata (Km/Jam)	Waktu Tempuh per 100 Km
1	Samarinda – Balikpapan	111	47,23	2,12
2	Samarinda – Tenggarong	45	30,00	3,33
3	Samarinda – Berau	575	33,82	2,96
4	Samarinda – Bontang	110	31,43	3,18
5	Samarinda – Sangatta	160	36,23	2,76
6	Samarinda - Kota Bangun	122	40,67	2,46
7	Samarinda – Melak	359	44,88	2,23
8	Balikpapan – Handil	96	38,40	2,60
9	Balikpapan – Bontang	230	46,00	2,17
10	Penajam - Tanah Grogot	138	46,00	2,17
Rata – Rata Waktu Tempuh Per 100 Km				2,60

Rata – rata waktu tempuh pelayanan angkutan umum AKDP di lapangan per 100 Km di Kalimantan Timur diperoleh dari tabel diatas adalah sebesar 2,60 jam atau 2 jam 36 menit. Rata – rata waktu tempuh yang tercantum pada Kartu Pengawasan di dapatkan dengan mengurangi jam kedatangan terhadap jam keberangkatan pada tiap rute sampel pada koridor utama pelayanan, dan diperoleh rata – rata waktu tempuh (KPS) tiap trayek sebagai berikut :

Waktu Tempuh di KPS Angkutan Umum AKDP di Kaltim

No	Koridor Utama Pelayanan Angkutan Umum AKDP	Berangkat	Tiba	Lama Perjalanan	
				Jam : Menit	Jam
1	Samarinda – Balikpapan	5:39:00 AM	8:30:00 AM	2:51:00	2,85
2	Samarinda – Tenggarong	6:00:00 AM	7:30:00 AM	1:30:00	1,5
3	Samarinda – Berau	12:30:00 PM	4:00:00 AM	15:30:00	15,5
4	Samarinda – Bontang	7:00:00 AM	10:00:00 AM	3:00:00	3
5	Samarinda – Sangatta	8:35:00 AM	12:00:00 PM	3:25:00	3,42
6	Samarinda - Kota Bangun	6:30:00 AM	9:30:00 AM	3:00:00	3
7	Samarinda – Melak	12:45:00 PM	8:30:00 PM	7:45:00	7,75
8	Balikpapan – Handil	7:00:00 AM	9:00:00 AM	2:00:00	2
9	Balikpapan – Bontang	6:00:00 AM	11:00:00 AM	5:00:00	5
10	Penajam - Tanah Grogot	9:30:00 AM	12:30:00 PM	3:00:00	3

Setelah diperoleh data antara rata – rata waktu tempuh kendaraan berdasarkan KPS, maka dengan menggunakan fungsi jarak dapat dikonversikan waktu tempuh berdasarkan KPS menjadi waktu tempuh rata – rata per 100 Km dengan rumus berikut :

$$t_2 = \frac{tkps}{dtrayek} \times 100 \text{ Km}$$

Dengan :

t_2 : Waktu tempuh KPS atau lama perjalanan KPS per 100 Km

t_{kps} : Waktu tempuh kendaraan AKDP berdasarkan KPS

d_{trayek} : Panjang rute trayek

dengan hasil rata – rata waktu tempuh per 100 Km berdasarkan KPS adalah sebagaimana tabel berikut :

Waktu Tempuh per 100 Km di KPS Angkutan Umum AKDP di Kalimantan Timur

No	Koridor Utama Pelayanan Angkutan	Lama Perjalanan		Jarak (Km)	Kecepatan (Km/Jam)	Waktu Tempuh/
		Jam :	Jam			

	Umum AKDP	Menit				100 Km
1	Samarinda – Balikpapan	2:51:000	2,85	111	38,95	2,57
2	Samarinda - Tenggarong	1:30:00	1,5	45	30,00	3,33
3	Samarinda - Berau	15:30:00	15,5	575	37,10	2,70
4	Samarinda - Bontang	3:00:00	3	110	36,67	2,73
5	Samarinda - Sangatta	3:25:00	3,42	160	46,83	2,14
6	Samarinda - Kota Bangun	3:00:00	3	122	40,67	2,46
7	Samarinda - Melak	7:45:00	7,75	359	46,32	2,16
8	Balikpapan - Handil	2:00:00	2	96	48,00	2,08
9	Balikpapan - Bontang	5:00:00	5	230	46,00	2,17
10	Penajam - Tanah Grogot	3:00:00	3	138	46,0	2,17
Rata – Rata Waktu Tempuh Per 100 Km						2,45

Setelah diperoleh data antara rata – rata waktu tempuh per 100 Km angkutan AKDP di Kalimantan Timur, maka selanjutnya dapat dilakukan perbandingan dengan rata – rata waktu tempuh riil per 100 Km dengan rumus berikut :

$$f(x) = \frac{\Delta \text{Waktu Tempuh KPS}/100 \text{ Km}}{\Delta \text{Waktu Riil Perjalanan}/100 \text{ Km}} \times 100 \%$$

Dengan :

$f(x)$: Prosentase kesesuaian antara waktu tempuh per 100 Km di KPS dengan waktu tempuh riil 100 Km

Δ Waktu Tempuh KPS/100 Km : Rata – rata waktu tempuh KPS atau lama perjalanan KPS per 100 Km

Δ Waktu Tempuh Riil/100 Km : Rata – rata waktu tempuh Riil atau lama perjalanan Riil per 100 Km

Rata – Rata Waktu Tempuh Berdasarkan KPS per 100 Km	Rata – Rata Waktu Tempuh Riil per 100 Km	% Kesesuaian
2,45	2,60	94 %

Indikator kinerja utama prosentase kesesuaian waktu tempuh rata – rata per 100 Km angkutan AKDP pada Kartu Pengawasan (KPS) terhadap kondisi lapangan terealisasi sebesar 94 % melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 90 %, nilai 90 % diartikan sebagai batas normal dengan toleransi

sebesar 10 %. Masih terdapatnya kerusakan jalan di beberapa ruas dan seringnya kecelakaan yang terjadi khususnya pada ruas Samarinda – Bontang dan Samarinda – Sangatta memperlambat waktu tempuh AKDP sehingga diharapkan stakeholder terkait untuk dapat memperbaiki kondisi jalan tersebut.

Capaian indikator kinerja utama prosentase kesesuaian waktu tempuh rata – rata per 100 Km angkutan AKDP pada Kartu Pengawasan (KPS) terhadap kondisi lapangan adalah sebesar 110,59 % tercapai.

Realisasi kesesuaian antara nilai dalam KPS terhadap nilai riil sebesar 94 % menunjukkan bahwa nilai dalam KPS masih dalam batas toleransi 20% atau kesesuaiannya lebih tinggi dari nilai 80 %. Apabila nilai kesesuaian antara KPS dan riil lebih rendah dari batas toleransi 20 %, maka menggambarkan bahwa penentuan waktu tempuh kendaraan pada Kartu Pengawasan (KPS) sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga perlu dilakukan kalkulasi ulang karena kecepatan kendaraan akan terlalu tinggi sehingga membahayakan keselamatan serta apabila kendaraan akan sampai ke terminal melebihi batas jadwal kedatangannya atau terlambat maka bus tidak akan dapat memasuki terminal karena slot waktu kedatangan telah terlewati dan menggambarkan lamanya pelayanan terhadap penumpang.

Indikator Kinerja Utama Prosentase kesesuaian waktu tempuh rerata per 100 Km Angkutan AKDP pada Kartu Pengawasan (KPS) terhadap kondisi lapangan belum didukung dengan kegiatan yang berbasis anggaran sehingga kedepannya perlu adanya kegiatan yang mendukung langsung IKU diatas.

2.3.5. Prosentase Kabupaten/Kota Berpredikat WTN.

Indikator Kinerja Utama Prosentase Kab/Kota berpredikat WTN (Wahana Tata Nugraha), merupakan indikator yang digunakan dalam mengevaluasi dan mengukur kinerja sistem transportasi di wilayah Kab/Kota. Dalam perhitungan prosentase Kab/Kota berpredikat WTN dilakukan dengan membandingkan jumlah Kabupaten/Kota berpredikat WTN dilakukan dengan membandingkan jumlah Kab/Kota yang menerima penghargaan WTN terhadap jumlah seluruh Kab/Kota di Kalimantan Timur :

$$f(x) = \frac{\sum \text{Kab/Kota Penerima WTN}}{\sum \text{Kab/Kota di Kaltim}} \times 100 \%$$

Dengan :

$f(x)$: Prosentase Kab/Kota berpredikat WTN

$\sum \text{Kab/Kota penerima WTN}$: Jumlah Kabupaten Kota yang menerima penghargaan WTN

$\sum \text{Kab/Kota di Kaltim}$: Total Jumlah Kabupaten Kota di Kaltim

Data jumlah Kabupaten/Kota penerima penghargaan Wahana Tata Nugraha di Kalimantan Timur disajikan dalam tabel berikut ini :

Jumlah Kab/Kota Penerima WTN :

No	Jenis Penghargaan	Satuan	Tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Plakat Wahana Tata Nugraha	Kab/Kota	-	-	1	1	-	-
2	Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Lalu Lintas	Kab/Kota	3	3	3	5	-	-
3	Piala Wahana Tata Nugraha Kategori Angkutan	Kab/Kota	-	-	-	-	-	-
4	Piala Wahana Tata Nugraha	Kab/Kota	1	1	1	1	7	8
5	Piala Wahana Tata Nugraha Wira Karya	Kab/Kota	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kab/Kota berpredikat WTN		Kab/Kota	4	4	5	7	7	8
% Kab/Kota berpredikat WTN di Kaltim		Kab/Kota	40 %	40 %	50 %	70 %	70%	80%

Keterangan : Untuk Tahun 2017 & 2018 kegiatan WTN Tingkat Provinsi

Kab/Kota Penerima WTN Tahun 2018 Tingkat Provinsi :

JENIS PENGHARGAAN	KAB/KOTA PENERIMA WTN TAHUN 2018	
Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	1. Balikpapan 2. Samarinda 3. Bontang 4. Kukar	5. Kutim 6. Penajam Paser Utara 7. Paser 8. Berau

Pelaksanaan sosialisasi untuk 10 (sepuluh) Kab/Kota yang ada di Kalimantan Timur sudah terlaksana secara keseluruhan dan jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti penilaian dan untuk menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Tingkat Provinsi adalah 8 (Delapan) Kabupaten/Kota atau sebesar 100 % dilihat dari pelaksanaan kegiatan pada

Tahun 2018.

Predikat WTN merupakan tolak ukur kinerja pelayanan Dinas Perhubungan di wilayah Kab/Kota, penilaian WTN meliputi sarana angkutan umum, prasarana lalu lintas, pelayanan masyarakat, komitmen daerah, perencanaan transportasi, pendanaan, kelembagaan dan sumber daya manusia.

Berbagai upaya penataan transportasi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan di lakukan Kab/Kota yang secara umum turut mendukung peran Provinsi dalam melakukan pembinaan transportasi di daerah. Beberapa kegiatan diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan pelayanan transportasi di Kab/Kota :

- a. Koordinasi Teknis (Rakornis) Dinas Perhubungan se-Kalimantan Timur diselenggarakan setiap tahun sebagai tempat koordinasi, konsultasi dan solusi Dinas Perhubungan Kab/Kota, Dinas Perhubungan Provinsi, Kementerian Perhubungan beserta UPT dan Satker-nya dan juga Stakeholder terkait (BUMN dan Perusahaan transportasi) ;
- b. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan yaitu berupa pemilihan pelajar pelopor keselamatan Jalan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 yang telah ditetapkan sebagai pemenang sesuai dengan peringkat 1 – 3 adalah Farhani SMAN 4 Balikpapan, Maulanda Naldiansyah SMAN 3 Tenggarong, dan Ananda Bayu Saputra MAN 1 Samarinda;
- c. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya dan kegiatan sosialisasi terhadap 10 Kab/Kota yang ada di Kalimantan Timur dengan kegiatan intinya yaitu penyelenggaraan penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) dan razia gabungan kendaraan angkutan di jalan Provinsi serta diadakannya kegiatan Rampcek bagi kendaraan Umum (bus) pada Terminal Tipe B.

Tahun 2017 & 2018 berbeda dengan tahun – tahun sebelumnya yaitu pelaksanaan kegiatan penilaian WTN pada tingkat nasional tidak dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sehingga Dishub Provinsi mensikapi dengan menyelenggarakan penilaian WTN dalam tingkat Provinsi dengan sebelumnya memberikan sosialisasi terhadap 10 Kab/Kota yang ada di Kalimantan Timur.

1. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

Indikator Kinerja	Program Pendukung
Prosentase Kab/Kota berpredikat WTN	1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan - Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Program dan Kegiatan yang menunjang indikator kinerja sasaran II masih perlu adanya inovasi yang dapat secara langsung menunjang target pencapaian indikator kinerja khususnya pada kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan yang tidak hanya sampai pada pemilihan pelajar pelopor tingkat nasional dimana pembinaan terhadap pelajar mengenai tertib lalu lintas harus disosialisasikan secara menyeluruh dan berkelanjutan sehingga pelajar merasa bahwa keselamatan berlalu lintas merupakan faktor penting dalam keseharian mereka dalam beraktifitas.

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1	Meningatnya Ketertiban Lalu Lintas di Kalimantan Timur	80 %	97,7 %	81,88 %

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja kurang dari 100% atau di 81,88% dikarenakan tidak ikutnya Kab/Kota khususnya Kab. Kutai Barat dan Kab. Mahulu dalam penilaian Piala Wahana Tata Nugraha tingkat Provinsi Kaltim, dengan pembinaan dan kesiapan dari seluruh Kab/Kota untuk dapat ikut dalam penilaian Piala Wahana Tata Nugraha tingkat Provinsi Kaltim diharapkan target indikator kinerja dapat tercapai.

Sasaran II yaitu Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas di Kalimantan

Timur juga mempunyai tingkat efisiensi yang kurang dari 100 %, indikator kinerja sasaran yaitu Prosentase Kab/Kota berpredikat WTN sangat tergantung pada pelaksanaan di tingkat nasional dan kesiapan Kab/Kota untuk mengikuti penilaian WTN, kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada pengguna transportasi diharapkan berpengaruh langsung kepada perbaikan indikator sasaran ini sehingga kesadaran untuk tertib dan keselamatan berkendara di jalan menjadi pola hidup masyarakat.

2.3.6. Prosentase Peningkatan Jumlah SDM yang Berkompetensi Teknis

Indikator Kinerja Utama Prosentase Peningkatan Jumlah SDM Yang Berkompetensi Teknis, merupakan indikator yang digunakan dalam mengevaluasi dan mengukur pengembangan kemampuan SDM yang berkompetensi teknis di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan sektor perhubungan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh aparatur sipil negara Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Data Kebutuhan SDM Berkompetensi Teknis Tahun 2018 :

No	Jenis Pendidikan/Pelatihan	Kebutuhan ASN (Orang)	Keterangan
1	Standard Akutansi Pemerintah (SAP)	8	STAN/Kemenkeu
2	Kehumasan & Keterbukaan Informasi Publik	2	Kominfo
3	Kearsipan	2	Badan Arsip
4	Perencanaan	2	Bappenas
5	Andalalin	3	Kemenhub
6	Pengujian Kendaraan Bermotor	2	Kemenhub
7	Teknik Transportasi	13	Kemenhub
8	Amdal	4	Universitas/Lembaga Diklat
9	Pengukuran Kapal	2	Kemenhub
10	Operasional Terminal	4	Kemenhub
11	Perkeretaapian	2	Kemenhub
12	Diklat Penilaian Pelayanan Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan	2	Kemenhub

13	Pemrograman dan Management Jaringan	2	Kominfo/Lembaga Diklat
14	Keteknisan Ilmu Pelayaran	4	Kemnhub
15	PPNS	4	Kemenhub
16	Diklat Revolusi Mental	23	Badan Diklat
17	Diklat Bimtek Tata Upacara Sipil	2	Badan Diklat
18	Diklat Teknis Dasar – Dasar Kesyahbandaran	6	BP2TL
19	Human Factor	1	Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII Dirjen Phb. Udara
20	Safety Management System	1	Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. VII Dirjen Phb. Udara
Jumlah		88	

Sumber : Subbag Umum Dinas Perhubungan Kaltim 2018

Untuk SDM Dinas Perhubungan Prov. Kaltim yang telah mempunyai kompetensi teknis adalah sebagai berikut :

Data Ketersediaan SDM yang Berkompetensi Teknis

No	Jenis Pendidikan/Pelatihan	ASN Dishub (Orang)	Keterangan
1	Standard Akutansi Pemerintah (SAP)	0	STAN/Kemenkeu
2	Kehumasan & Keterbukaan Informasi Publik	2	Kominfo
3	Kearsipan	3	Anwardini Parno Dwi Ermayani
4	Perencanaan	1	Andik Wahyudi, ST, MT
5	Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	6	Mahmud Syamsul Hadi, ATD H. Andik Wahyudi, ST, MM Endang Suherlan, SSit, MSi Jaka Purwa Indarta, ATD, MT Ary Nugraha, SE M. Rayani, SSit
6	Pengujian Kendaraan Bermotor	1	M. Yuni Hadi Sutopo, SE
7	Teknik Transportasi	1	I. Wayan Prajna S.D, ST
8	Amdal B	1	H. Andik Wahyudi, ST, MM
9	Pengukuran Kapal (Sertifikasi & Registrasi Kapal)	1	H. Andik Wahyudi, ST, MM
10	Operasional Terminal	0	-
11	Perkeretaapian	1	H. M. Yusuf

12	Diklat Penilaian Pelayanan Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan	4	1. H. Andik Wahyudi, ST, MM 2. M. Rayani 3. Rudianto L. 4. M. Aliwan
13	Pemrograman dan Management Jaringan	0	-
14	Keteknisan Ilmu Pelayaran	1	Luis Setiawan, Amd
15	PPNS	11	Sujiati Ary Nugraha, SE Yuni Hadi Saputra, SE Rudianto Lumbantoruan, ST I Wayan Prajna, ST Royan Hargi Saputra, ST Maryudi Utomo, ST Achmad Zaki Mubarak, ST Mahezha Jennar, SSTP Monica Uli Gultom, SH M. Fachrial, S.Kom
16	Diklat Bimtek Tata Upacara Sipil	2	M. Rayani dan M. Yuni Hadi Hadi Sutopo
17	Diklat Revolusi Mental	6	1. H. Salman Lumoindong 2. Suyatno 3. H. Andik Wahyudi 4. Yasir 5. Anif Fakhruddin 6. Jaka P Indarta
18	Diklat Teknis Dasar – Dasar Kesyahbandaran	6	1. I Wayan Pradjna, ST 2. Rudianto L, ST 3. Endang Saputro 4. Arisandy Ade Astuty, SE 5. Hj. Ida NoviantyZ, SE 6. Lusi Agustini
19	Petugas Keselamatan ASDP	1	H. Andik Wahyudi, ST, MM
20	Ekonomi Lingkungan	1	H. Andik Wahyudi, ST, MM
21	Manajemen Operasional Pelabuhan Penyeberangan	1	H. Andik Wahyudi, ST, MM
19	Human Factor	1	1. Dedi Sarwanto, SE
20	Safety Management System	1	1. Maryudi Utomo, ST
Jumlah		52	Pegawai Negeri Sipil

s dapat dilihat bahwa ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi teknis masih belum merata di lingkup Dinas Perhubungan Prov. Kaltim.

Indikator Prosentase Peningkatan Jumlah SDM yang Berkompetensi Teknis didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Rendahnya capaian antara lain disebabkan :

1. Belum adanya pemetaan kebutuhan dan ketersediaan SDM terkait kompetensi teknis;

2. Koordinasi dengan pihak penyelenggaraan pendidikan yang terlambat;
 3. Rendahnya minat ASN untuk mengikuti pendidikan dikarenakan tugas – tugas pokok yang sulit untuk ditinggalkan;
 4. Bimtek lebih diminati daripada Diklat dikarenakan waktu yang lebih singkat.
- Untuk meningkatkan jumlah SDM yang berkompetensi Teknis, Sekretariat khususnya Subag Kepegawaian diharapkan berperan aktif dalam pemetaan dan ketersediaan SDM terkait kompetensi teknis dan berkoordinasi dengan pihak penyelenggaraan pendidikan sehingga target capaian Indikator Prosentase Peningkatan Jumlah SDM yang Berkompetensi Teknis dapat tercapai.

2.3.7. Prosentase Kelulusan Taruna Yang Bersertifikat Pelaut

Indikator Kinerja Utama Prosentase Kelulusan Taruna yang Bersertifikasi Pelaut, merupakan indikator yang digunakan dalam mengevaluasi dan mengukur mutu lulusan Taruna SMK Pelayaran Kaltim. Taruna SMK Pelayaran setelah lulus dari Ujian Nasional di akhir kelas III di arahkan untuk mengikuti ujian pra prala (pra praktek berlayar) di BPSPDM Surabaya, bila lulus dari ujian pra prala maka Taruna dapat mengikuti magang di perusahaan – perusahaan pelayaran kurang lebih selama 6 bulan dan kemudian dapat mengikuti ujian pasca prala (pasca praktek berlayar) untuk kemudian akan mendapatkan sertifikat dengan kualifikasi pelaut.

$$f(x) = \frac{\sum \text{Taruna Lulus Sertifikasi Pelaut}}{\sum \text{Taruna Lulus}} \times 100 \%$$

Dengan :

$f(x)$: Prosentase jumlah taruna yang lulus sertifikasi pelaut/Ujian Pasca Praktek Berlayar

$\sum \text{Taruna Lulus Sertifikasi Pelaut}$: Jumlah taruna yang lulus Sertifikasi Pelaut/Ujian Pasca Praktek Berlayar selama tahun 2018

$\sum \text{Taruna Lulus}$: Jumlah taruna yang lulus Ujian Pra Praktek Berlayar selama tahun 2018

Tabel Kelulusan Siswa dan Sertifikasi Pelaut

Tahun	Lulusan Ujian Pra Prala		Lulus Ujian Pasca Prala		Jumlah Lulus	Jumlah Sertifikasi	Prosentase Sertifikasi
	Teknika	Nautika	Teknika	Nautika			
2012/2013	27	23	6	3	50	9	18 %

2013/2014	44	45	14	14	89	28	31,46 %
2014/2015	21	17	7	13	38	20	52,63 %
2015/2016	23	19	35	27	42	30	71,43 %
2016/2017	22	23	32	26	60	45	75 %
2017/2018	22	23	32	26	60	45	75 %

Secara prosentase jumlah lulusan SMKN Pelayaran yang memiliki sertifikasi pelaut cenderung meningkat, peningkatan ini tidak lepas dari adanya peningkatan kualitas pendidikan di SMKN Pelayaran baik melalui peningkatan sarana dan prasarana maupun standard pendidikan, mulai tahun 2014 telah dimulai pembangunan asrama bagi siswa dan laboratorium yang representatif dan dibarengi dengan melengkapi syarat – syarat untuk mendapatkan sertifikasi APPROVAL dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia PerhubunganKementrian Perhubungan.

Permasalahan kekurangan guru tetap, proses seleksi masuk siswa dan bimbingan dalam menghadapi ujian pra prala masih menjadi penyebab target belum tercapai, sehingga diperlukan inovasi dari SMKN Pelayaran untuk dapat meningkatkan kemampuan akademis dan teknis dari para siswa sehingga dapat lulus ujian sertifikasi menjadi pelaut.

1. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

Indikator Kinerja	Program Pendukung
1. Prosentase Peningkatan Jumlah SDM yang Memiliki Kompetensi Teknis	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Prosentase Kelulusan Taruna yang Bersertifikasi Pelaut	2. Program Peningkatan SDM Perhubungan

Program dan Kegiatan yang menunjang indikator kinerja sasaran III sudah cukup baik dan sesuai hanya diperlukan perbaikan pada tahapan pelaksanaan dari program dan kegiatan yang telah disusun sehingga capaian kinerja dan daya serap anggaran menjadi lebih baik.

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1	Prosentase Peningkatan Jumlah SDM yang Memiliki Kompetensi Teknis	71,88 %	88,94 %	80,82 %

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja kurang dari 100% atau di 80,82% dimana capaian kinerja selaras dengan capaian penyerapan anggaran yang masih di bawah 90%, serapan anggaran program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur masih rendah di 53,23% dikarenakan anggaran untuk diklat PPNS tidak dapat terlaksana.

Prosentase Peningkatan Jumlah SDM yang Memiliki Kompetensi Teknis mencapai 68,75% dan Prosentase Kelulusan Taruna yang Bersertifikasi Pelaut mencapai 75% dengan rata – rata 71,88% dari target rata – rata 90% atau kurang 18,12% dari target. Indikator Peningkatan Jumlah SDM yang Memiliki Kompetensi Teknis harus menjadi perhatian agar capaiannya dapat meningkat di tahun depan.

2.3.8. Prosentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan

Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan:

1. Prosentase Ketersediaan Terminal Tipe B
2. Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Laut
3. Prosentase Ketersediaan Bandar Udara
4. Prosentase Ketersediaan Dermaga Sungai dan Penyeberangan

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 :

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Prosentase Ketersediaan Terminal tipe B	%	100	100	100
2	Prosentase Ketersediaan Pelabuhan laut	%	100	100	100
3	Prosentase ketersediaan Bandar Udara	%	100	100	100
4	Prosentase ketersediaan dermaga sungai dan penyeberangan	%	100	100	100

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan Tahun 2016 :

No.	Indikator Kinerja	Sat	Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	% Penurunan/ Peningkatan Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7 (6-5/5x100%)
1	Prosentase Ketersediaan Terminal tipe B	%	-	87,5	100	14.28%
2	Prosentase Ketersediaan Pelabuhan laut	%	-	100	100	0%
3	Prosentase ketersediaan Bandar Udara	%	-	88,34	100	11,66%
4	Prosentase ketersediaan dermaga sungai dan penyeberangan	%		93,75	100	6,25%

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA/RPJMD :

No.	Indikator Kinerja	Sat	Target Akhir RPJMD/RENTA	Realisasi Tahun 2018	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Prosentase Ketersediaan Terminal tipe B	%	100	100	100
2	Prosentase Ketersediaan Pelabuhan laut	%	100	100	100
3	Prosentase ketersediaan Bandar Udara	%	100	100	100
4	Prosentase ketersediaan dermaga sungai dan penyeberangan	%	100	100	100

d. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja :

1. Indikator Kinerja VII (Prosentase ketersediaan terminal tipe B) :

Indikator Kinerja Utama Prosentase ketersediaan terminal tipe B, merupakan indikator yang digunakan dalam upaya peningkatan infrastruktur perhubungan yang berfungsi untuk pelayanan kepada masyarakat terkait dengan penyediaan transportasi massal.

Terminal tipe B sesuai dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 adalah dalam kewenangan Pemerintah Provinsi, pada Tahun 2016

persiapan serah terima/P3D antara Pemerintah Kabupaten/Kota di Prov. Kaltim dengan Pemprov Kaltim mulai dilakukan, pembentukan struktur organisasi baru di Dinas Perhubungan Prov. Kaltim mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2017 dimana dibentuk satu Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal. Terminal Tipe B yang akan dikelola oleh UPTD Terminal Dishub Prov. Kaltim adalah Terminal Sungai Kunjang Samarinda, Terminal Lempake Samarinda, Terminal Timbau Kutai Kertanegara, Terminal Bontang, Terminal Sangatta, Terminal Paser dan Terminal Berau.

Dalam perhitungan Prosentase ketersediaan terminal tipe B adalah dengan ketersediaan terminal tipe B di 10 Kab/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini guna menunjang akses mobilitas masyarakat yang bertujuan dalam pelayanan dasar terhadap masyarakat di bidang transportasi merupakan hal yang harus diperhatikan.

Jumlah Terminal Tipe B yang ada di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten Kota	Terminal Tipe B	Keterangan
1	Samarinda	2	1. Terminal Sungai Kunjang 2. Terminal Lempake
2	Balikpapan	-	-
3	Bontang	1	Terminal Bontang
4	Paser	1	Terminal Tepian Batang
5	Penajam Paser Utara	-	-
6	Kutai Kartanegara	1	Terminal Timbau
7	Kutai Timur	1	Terminal Sangatta
8	Kutai Barat	-	-
9	Berau	1	Terminal Rinding
10	Mahakam Ulu	-	-
	Jumlah	7	Terminal Tipe B

Sumber : UPTD Terminal Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada Kab/Kota di Kalimantan Timur yang masih belum memiliki Terminal Tipe B yaitu : Kab.

Penajam Paser Utara, Kab Kutai Barat dan Kab Mahakam Ulu. Faktor alasan yang memicu belum tersedianya Terminal Tipe B pada Kab/Kota tersebut adalah :

1. Kabupaten Penajam Paser Utara, masih belum tersedianya lokasi, namun dalam hal ini terminal yang sudah ada memiliki pola layanan AKDP yang secara aset dan kelayakan belum ada pelimpahan wewenang kepada Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Kutai Barat, belum tersedianya lokasi.
3. Kabupaten Mahakam Ulu, masih terhambat oleh akses transportasi darat yang tidak memadai dan penentuan lokasi yang belum ditentukan.

2. Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Laut

Jumlah Pelabuhan Laut di Kalimantan Timur yang menunjang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim dan Capaian Kinerja RPJMD 2013-2018 adalah sebagai berikut :

No	Kabupaten Kota	Jumlah	Fungsi dan Hirarki Pelayanan
1	Kota Samarinda : a. Pelabuhan Samarinda b. Terminal Peti Kemas Palaran	1	Pelabuhan Pengumpul dan 1 Terminal Peti Kemas
2	Kota Balikpapan : a. Pelabuhan Semayang b. Terminal Peti Kemas Kariangau	1	Pelabuhan Utama dan 1 Terminal Peti Kemas
3	Kota Bontang : a. Pelabuhan Loak Tuan b. Pelabuhan Tanjung Laut	2	Pelabuhan Pengumpul
4	Kabupaten Paser : a. Pelabuhan Teluk Adang Pondong	1	Pelabuhan Pengumpul
5	Kabupaten Penajam Paser Utara : a. Pelabuhan Penajam	1	Pelabuhan Pengumpul
6	Kab. Kutai Kartanegara : a. Pelabuhan Kuala Samboja b. Pelabuhan Marangkayu	2	Pelabuhan Pengumpul
7	Kabupaten Kutai Timur : a. Pelabuhan Kenyamukan b. Pelabuhan Maloy c. Pelabuhan	3	Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Pengumpulan Regional

	Sangkulirang		
8	Kabupaten Berau : a. Pelabuhan Tanjung Redeb b. Pelabuhan Mantaritip	2	Pelabuhan Pengumpul Pelabuhan Pengumpan Regional
9	Kabupaten Kutai Barat	-	-
10	Kabupaten Mahulu	-	-
	Jumlah	13	

Sumber : Kepmen Perhubungan No. 432 Tahun 2017

Pembangunan Pelabuhan dengan sumber APBD Kaltim Tahun 2013 – 2018 diprioritaskan pada penyelesaian pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Teluk Golok Kabupaten Kutai Timur.

Indikator Kinerja Utama Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Laut, merupakan indikator yang digunakan dalam upaya peningkatan infrastruktur perhubungan di KEK Maloy yaitu sisi darat dari Pelabuhan Laut Maloy dimana sampai dengan tahun 2017 telah terbangun fasilitas sisi darat berupa bangunan kantor pelabuhan dan penunjangnya dan yang telah dikerjakan pada tahun 2017 yaitu jalan akses yang menghubungkan dermaga dan trestle yang telah dibangun dengan APBN dengan sisi darat dan target sampai dengan akhir RENSTRA 2013 – 2018 adalah menyempurnakan jalan akses tersebut dengan membangun Abutment pada sambungan trestle dan causeway/jalan pendekat.

Kegiatan tahun 2018 berupa Pekerjaan pembangunan Abutment di causeway fisik 100 % dan realisasi keuangan 98,56 %, seperti tabel dibawah.

Tabel 3.2.1
Program dan Kegiatan Tahun 2018

No	Kegiatan Tahun 2018	Target Sasaran	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1	Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Kutai Timur (Pekerjaan pembangunan Abutment di causeway Pelabuhan Maloy)	100 %	100 %	98,56%

Sumber Data : Dokumen Monev Dishub Prov Kaltim Tahun 2018

Dalam perhitungan Prosentase Ketersediaan Pelabuhan Laut dilakukan dengan menggunakan jumlah ketersediaan fasilitas atau prasarana di Pelabuhan Laut Maloy yang harus tersedia.

Dari data diatas target 100 % berupa bangunan kantor dan penunjangnya beserta jalan akses ke trestle dan abutmentnya dapat dicapai pada tahun 2018. Diharapkan agar sisi Laut segera disempurnakan oleh Kementerian Perhubungan dengan membangun 4 segmen dermaga dari 2 segmen yang telah terbangun pada tahun 2018 dan pada sisi kawasan untuk segera membangun fasilitas tangki timbun sehingga Pelabuhan Laut Maloy dapat segera berfungsi.

3. Prosentase Ketersediaan Bandara Udara

Jumlah Bandar Udara Laut di Kalimantan Timur yang menunjang Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Kaltim dan Capaian Kinerja RPJMD 2013-2018 adalah sebagai berikut (sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No. 69 Tahun 2013 tentang Tata Nal Kebandarudaraan Nasional dan Rencana Induk Bandar Udara Nasional) :

No	Kabupaten Kota	Jumlah	Fungsi dan Hirarki Pelayanan
1	Kota Samarinda : Bandar Udara APT Pranoto Samarinda	1	Pengumpan Skala Sekunder (PS)
2	Kota Balikpapan : Bandar Udara Sepinggan Balikpapan	1	Pengumpan Skala Primer (PP)
3	Kota Bontang : Bandar Udara LNG Bontang	1	Pengumpan Skala Tersier (PT)
4	Kabupaten Paser : Bandar Udara Paser	1	Pengumpan
5	Kab. Kutai Kartanegara Bandara Kota Bangun	1	Pengumpan
6	Kabupaten Kutai Timur : a. Bandar Udara Muara Wahau b. Bandar Udara Tanjung Bara	2	Pengumpan
8	Kabupaten Berau : a. Bandara Kalimantan b. Bandara Maratua	2	Pengumpan Skala Tersier (PT) Pengumpan
9	Kabupaten Kutai Barat : Bandara Melalan	1	Pengumpan

10	Kabupaten Mahulu : Bandara Datah Dawai	1	Pengumpan
	Jumlah	11	

Sumber : Kepmen Perhubungan No. 69 Tahun 2013

Melihat kondisi geografis Kalimantan Timur dimana akses darat ke daerah terpencil dan jarak tempuh yang cukup lama dan berbahaya menjadi kendala dalam pembangunan Kab/Kota di Kalimantan Timur, maka transportasi udara merupakan salah satu moda yang sangat penting untuk dikembangkan. Pembangunan bandara baru untuk memenuhi pelayanan transportasi udara bagi masyarakat Kaltim sangat dibutuhkan, pembangunan bandara baru dilakukan jika bandara yang ada sudah tidak dapat dikembangkan lagi untuk memenuhi pertumbuhan penumpang yang terus berkembang dan aspek keselamatan penerbangan yang harus dipenuhi.

Prosentase pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur pada 5 (lima) Tahun terakhir ini juga semakin bertambah pesat dan kebutuhan transportasi udara perlu dikembangkan guna terlaksananya kemudahan mobilitas penduduk yang ada di Kalimantan Timur khususnya pada wilayah-wilayah terpencil.

Program dan kegiatan ketersediaan Bandar Udara Tahun 2018

No	Kegiatan Tahun 2018	Target Sasaran	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1	Lanjutan Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru	100 %	100 %	87,88 %

Sumber : Dokumen Monev Dishub Kaltim 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa kegiatan Pembangunan ketersediaan Bandar Udara yang ada di Kalimantan Timur pada Tahun 2018 sudah berjalan dengan baik, dengan berakhirnya RPJMD Tahun 2013-2018 dengan diakhiri oleh Pembangunan Bandar Udara APT. Pranoto (Bandara Samarinda Baru) di Kota Samarinda yang langsung diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo pada Tanggal 25 Oktober Tahun 2018.

4. Indikator Kinerja X (Prosentase Ketersediaan Dermaga Sungai dan Penyeberangan)

Indikator Kinerja Utama ketersediaan Dermaga SDP, merupakan indikator yang digunakan dalam mengevaluasi dan mengukur peningkatan pelayanan angkutan SDP. Pada tahun 2018 ditetapkan kegiatan prioritas sektor SDP adalah meningkatkan fasilitas dan kualitas pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kariangau, melaksanakan kegiatan rampchek terhadap kapal yang beroperasi yang laik layar dan fasilitas keselamatan yang ada di dermaga maupun di kapal. Pada Tahun 2018 tidak diadakannya pembangunan maupun kegiatan rehabilitasi pada Pelabuhan Penyeberangan Kariangau namun kegiatan pengawasan, pembinaan dan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi bidang pelayaran tetap dilaksanakan dengan baik. Dermaga sungai dan pelabuhan penyeberangan yang secara hirarki melayani antar Kab/Kota di Kaltim

No	Kabupaten Kota	Jumlah	Fungsi dan Hirarki Pelayanan
1	Kota Samarinda : Dermaga Sei Kunjang	1	Lintas Kabupaten
2	Kota Balikpapan : Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Dermaga Kampung Baru	2	Lintas Kabupaten
3	Kab. PPU Pelabuhan penyeberangan Penajam Dermaga Penajam	2	Lintas Kabupaten
4	Kabupaten Paser : Dermaga Kendilo	1	Lintas Kabupaten
5	Kab. Kutai Kartanegara Dermaga Tenggarong Dermaga Kota Bangun Dermaga Tabang Dermaga Muara Pahu	4	Lintas Kabupaten
6	Kabupaten Kutai Barat : Dermaga Melak Dermaga Tering	2	Lintas Kabupaten
7	Kabupaten Mahulu : Dermaga Batu Dinding Dermaga Long Bagun Dermaga Long Pahangai Dermaga Long Apari	1	Pengumpan
	Jumlah	11	

Sumber : Bidang Pelayaran, 2018

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

Indikator Kinerja	Program Pendukung
1. Prosentase ketersediaan terminal tipe B 2. Prosentase ketersediaan pelabuhan laut. 3. Prosentase Ketersediaan Bandar Udara 4. Prosentase Ketersediaan Dermaga Sungai dan Penyeberangan	1. Program Peningkatan Daya Saing Investasi Sektor Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP

Program dan Kegiatan yang menunjang indikator kinerja sasaran IV sudah cukup baik dan sesuai hanya diperlukan perbaikan pada tahapan pelaksanaan dari program dan kegiatan yang telah disusun sehingga capaian kinerja dan daya serap anggaran menjadi lebih baik.

6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1	Prosentase ketersediaan Infrastruktur Perhubungan	100 %	87,95 %	113,7 %

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efisiensi antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja sudah cukup baik, sasaran Prosentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan merupakan kegiatan pembangunan fisik infrastruktur bidang perhubungan yang didominasi oleh kegiatan pembangunan Bandara Samarinda Baru dan pembangunan Pelabuhan Laut Maloy, kedua kegiatan tersebut telah selesai 100% dan untuk Bandara Samarinda Baru atau Bandara APT. Pranoto telah beroperasi dengan baik. Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Infrastruktur Perhubungan mempunyai tingkat efisiensi dapat dikatakan cukup baik, koordinasi bersama

stakeholder terkait dalam menyelesaikan program pembangunan agar dapat selalu ditingkatkan sehingga permasalahan di lapangan tidak mengambat proses pembangunan.

Tabel 2.3 menjelaskan bahwa sasaran indikator kinerja SKPD Dinas Perhubungan Prov Kaltim pada Tahun 2013 – 2018 mengalami satu kali perubahan (revisi) dimana pada Tahun 2013 – 2016 memiliki sasaran: "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Infrastruktur", Sedangkan pada Tahun 2016 – 2018 memiliki 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi
2. Meningkatnya Ketertiban Lalu Lintas di Kalimantan Timur
3. Meningkatnya Pemenuhan Standar SDM Teknis Perhubungan
4. Meningkatnya Jumlah Penumpang yang Terlayani

Dari hal tersebut diatas, dengan demikian Indikator Kinerja SKPD Dinas Perhubungan Prov. Kaltim secara garis besar memiliki pencapaian target setiap tahunnya dan mengalami peningkatan yang signifikan dengan menyesuaikan sasaran yang tertuang dalam Renstra 2013 – 2018, namun masih ada beberapa uraian indikator kinerja yang belum mencapai target seperti:

1. Prosentase peningkatan jumlah SDM yang berkompetensi Teknisrealisasi 35%, hal ini jauh dari target yang ditetapkan yaitu 80%;
2. Prosentase Kab/Kota berpredikat WTNmemiliki realisasi 80% sedangkan target yang ditentukan adalah 90 % karena masih ada beberapa Kabupaten/Kota yang tidak mengikutikegiatan ini;
3. Prosentase ketersediaan terminal tipe B mempunyai realisasi 75% sedangkan target yang ditetapkan adalah 85%, hal ini terjadi dikarenakan masih ada Kab/Kota yang belum memiliki terminal tipe B yang aktif (implementasi Undang Undang 23 Tahun 2014)

Hambatan – hambatan yang dihadapi untuk mencapai target kinerja tersebut antara lain adalah :

1. Belum adanya pemetaan kebutuhan dan ketersediaan SDM terkait kompetensi teknis, Koordinasi dengan pihak penyelenggaraan pendidikan yang terlambat
2. Rendahnya minat ASN untuk mengikuti Diklat Teknis dikarenakan tugas – tugas pokok yang sulit untuk ditinggalkan.

3. Komposisi jumlah ASN dengan bidang tugasnya tidak sebanding. Hal ini dikarenakan rendahnya rekrutment ASN sesuai dengan kompetensi
4. Penilaian WTN oleh Kementrian Perhubungan dilaksanakan 2 tahun sekali sehingga saat tidak ada pelaksanaan WTN oleh Kementerian Perhubungan, Dishub Prov. Kaltim mengambil inisiatif untuk tetap melakukan penilaian kriteria WTN terhadap Kab/Kota dengan harapan bahwa Kab/Kota dapat terpacu untuk menindaklanjuti rekomendasi penilaian tersebut untuk meningkatkan kawasan tertib lalu – lintas di Kab/Kota yang selama ini belum menjadi target dari Kab/Kota.
5. Lambatnya proses serah terima P3D Pengelolaan terminal tipe B Kab/Kota ke Pemerintah Provinsi.
6. Minimnya prasarana fasilitas Terminal Type B yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi.
7. Masih terdapat 2 Kabupaten yang sampai saat ini belum melakukan serah terima pelimpahan P3D tentang pengelolaan terminal type B yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Barat.

Resume hasil capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur melalui pelaksanaan Renstra 2013-2018 sebagai berikut :

- a. Terbangun dan beroperasinya Bandar Udara APT Pranoto Samarinda dengan panjang landasan 2.250 m x 45 m
- b. Terbangun dan beroperasinya Bandar Udara Maratua Kab. Berau dengan panjang landasan 1.650 m x 35 m
- c. Terbangunnya pelabuhan laut internasional Maloy Teluk dengan fasilitas darat dan laut berupa trestle panjang 750 m dan 4 dermaga dengan fungsi layanan Pelabuhan Pengumpul Multipurpose. Ditargetkan akhir Desember 2019 pelabuhan beroperasi.
- d. Menurunnya angka kecelakaan/fatalitas di jalan sebesar 15 %.
- e. Meningkatkan kedisiplinan masyarakat pemakai jasa perhubungan di Kalimantan Timur baik pelajar, awak angkutan umum dan masyarakat
- f. Meningkatnya Retribusi PAD Sektor Perhubungan sebesar 10 % meliputi jasa perizinan sector darat, pelabuhan penyeberangan, dan jasa terminal

- g. Tumbuh kembangnya tingkat disiplin ASN dan Non ASN dilingkungan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dengan mengacu dan mempedomani Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
- h. Dengan pola kerjasama dengan Kementerian Perhubungan melalui Alokasi Anggaran APBN telah dapat menumbuh kembangkan perekonomian makro (PDRB) melalui sector jasa perhubungan

2.3.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khususnya pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Perhubungan, pada level program selanjutnya, kinerja dinas di analisa pengelolaan pendanaan pelayanan dinas melalui Renstra Dinas periode perencanaan sebelumnya Tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.4. (TC.24)
Anggaran dan Reaslisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rata - Rata Pertumbuhan	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,484,058,000	4,133,450,000	7,155,655,000	7,472,556,571	3,246,035,000	3,674,985,000	3,916,217,841	3,743,158,790	5,773,264,896	6,846,289,681	2,878,596,372	3,404,477,309	87.34%	90.56%	80.68%	91.62%	88.68%	92.64%	-2.68%	-1.93%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,382,585,300	1,705,250,000	16,135,543,000	10,389,425,000	745,350,000	1,697,850,000	2,226,605,413	1,619,251,140	14,706,519,413	9,934,725,872	731,972,212	1,656,230,050	93.45%	94.96%	91.14%	95.62%	98.21%	97.55%	-2.07%	-1.85%
3	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah					2,294,685,000	2,159,189,000					2,191,181,859	1,962,320,333					95.49%	90.88%	-3.04%	-5.51%
	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan					4,500,000						4,472,500						99.39%			
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	173,250,000	302,200,000	354,800,000	345,700,000			171,913,500	294,321,700	354,211,640	336,711,000			99.23%	97.39%	99.83%	97.40%			14.66%	14.24%
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	375,000,000	480,000,000	864,200,000	1,219,000,000			324,825,400	330,751,800	425,473,850	1,091,664,176			86.62%	68.91%	49.23%	89.55%			28.73%	35.29%
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan	235,000,000	339,850,000	102,000,000				215,000,000	275,100,000	101,962,000				91.49%	80.95%	99.96%				-19.65%	-19.09%
7	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	3,304,090,000	3,427,331,250	9,170,250,000		1,188,650,000	162,346,000	2,748,204,520	2,934,562,157	4,216,038,920		1,068,456,335	159,548,639	83.18%	85.62%	45.98%		89.89%	98.28%	-18.21%	-23.27%
8	Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Fasilitas LLAJ	200,000,000	200,000,000	161,690,000				150,893,550	198,353,550	161,402,000				75.45%	99.18%	99.82%				-6.82%	-29.55%
9	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1,039,400,000	8,298,050,000	937,800,000	847,472,100	643,700,000	1,082,700,000	900,201,100	8,033,889,206	779,783,300	653,080,200	604,977,700	1,039,260,197	86.61%	96.84%	83.15%	77.06%	93.98%	95.99%	0.34%	1.16%
10	Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	814,200,000	1,059,000,000	1,466,140,000	919,000,000			754,680,000	949,600,000	1,296,700,000	779,930,000			92.69%	89.67%	88.44%	84.87%			2.46%	0.67%
11	Program Pembangunan Sarana & Prasarana Perhubungan	715,235,573,103	205,825,876,134		7,260,481,300			650,584,475,942	187,861,259,806		6,893,651,925			90.96%	91.27%		94.95%			-76.26%	-76.15%
12	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	6,905,298,366	9,000,000,000	6,586,633,890	4,050,380,549	637,700,000	8,003,559,000	6,187,306,350	8,175,702,700	4,469,328,950	3,940,823,300	587,307,000	7,999,833,824	89.60%	90.84%	67.85%	97.30%	92.10%	99.95%	3.12%	5.78%
13	Program Peningkatan SDM Perhubungan			2,102,987,000	2,382,287,000	1,264,180,000	3,247,951,000		1,648,951,000	1,952,975,000	1,194,875,000	3,000,315,950				78.41%	81.98%	94.52%	92.38%	12.73%	38.48%
14	Program Peningkatan Daya Saing Investasi Sektor Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP			234,874,286,310	208,672,252,150	321,955,684,236.80	110,247,793,000		227,418,955,847	200,858,629,166	310,837,537,128.80	96,968,723,146				96.83%	96.26%	96.55%	87.96%	-14.23%	11.60%
15	Program Pembukaan Ketersediaan Wilayah Sektor Transportasi Darat, Sungai, Danau dan Penyeberangan			1,000,000,000					885,018,000							88.50%					
16	Program Pembukaan Ketersediaan Wilayah Sektor Transportasi Udara			20,000,000,000	13,392,945,000				19,576,773,835	13,280,348,900						97.88%	99.16%			-19.79%	-19.16%
	Jumlah	735,148,454,769	234,769,007,384	300,911,985,200	256,951,499,670	331,980,484,236.80	130,276,373,000	668,180,323,616	214,415,950,849	281,814,383,651	246,568,829,220	320,099,376,106.80	116,190,709,448	90.89%	91.33%	93.65%	95.96%	96.42%	89.19%	-30.40%	-29.88%

Catatan :

Pada periode 2013 – 2018 terdapat perubahan Program/Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Semula (kurun waktu 2013 – 2016) :

- a. Jumlah Program : 11 Program
- b. Jumlah Kegiatan : 55 Kegiatan

2. Menjadi (kurun waktu 2017 – 2018) :

- a. Jumlah Program : 8 Program
- b. Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan

Rasio realisasi anggaran Dinas Perhubungan Prov. Kaltim selama periode 2013 – 2018 rata – rata adalah 93 % dengan rasio tertinggi pada tahun 2017 sebesar 96,42% dan rasio terendah pada tahun 2018 sebesar 89,19%. Pertumbuhan anggaran selama periode 2013 – 2018 dan realisasi menurun sebesar $\pm 30\%$. Rata – rata rasio realisasi anggaran sebesar 93% adalah rasio yang cukup baik dicapai oleh Dinas Perhubungan Prov. Kaltim dimana pendanaan pada program prioritas yang merupakan pembangunan fisik menjadi faktor yang mempengaruhi daya serap anggaran, permasalahan pembangunan fisik di lapangan sangat mempengaruhi daya serap anggaran sehingga diperlukan manajemen proyek yang baik untuk dapat meningkatkan daya serap anggaran.

Rasio realisasi anggaran pada program – program bersifat manajerial berkisar di angka $\pm 88\%$ atau masih di bawah 90%, sehingga masih perlu menjadi perhatian untuk dapat meningkatkannya, KPA dan PPTK mempunyai peran penting untuk dapat merencanakan dan merealisasikan dengan baik kegiatannya sesuai target realisasi yang telah ditetapkan.

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan agar dapat ditindaklanjuti sehingga dapat mempercepat daya serap anggaran pada pelaksanaan Renstra selanjutnya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

1. Kondisi geografis Kalimantan Timur yang berada di antara perairan ALKI II
2. Keberagaman Sumber Daya Alam Kalimantan Timur yang beraneka ragam, yang memungkinkan lahirnya inovasi-inovasi di Bidang Perhubungan
3. Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang proporsional karena masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki kemampuan yang sangat signifikan untuk dikembangkan
4. Penyebaran penduduk di Kalimantan Timur yang tidak merata, sehingga sangat memerlukan kesinambungan dan integrasi sector transportasi kewilayahan
5. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalimantan Timur
6. Kondisi pertumbuhan ekonomi masyarakat Kalimantan Timur
7. Gaya hidup masyarakat Kalimantan Timur
8. Kemajemukan tersedianya sarana dan prasarana di Kalimantan Timur
9. Lemahnya pelaksanaan regulasi Bidang Perhubungan di Daerah
10. Minimnya Regulasi/Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Bidang Perhubungan baik perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara
11. Kurang optimalnya tingkat konsistensi penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
12. Reharmonisasi Regulasi antara Pusat dan Daerah
13. Pengembangan Pelabuhan Balikpapan (Terminal Peti Kemas Kariangau) menjadi peluang Pendapatan
14. Menjadikan Kaltim Berdaulat di Bidang Perhubungan

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Keinginan dan cita cita Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk mengintegrasikan sarana dan prasarana transportasi antar wilayah
2. Gaya hidup masyarakat Kalimantan Timur yang dominan konsumtif, sehingga memacu pelayanan transportasi yang harus merata dan mencukupi
3. Kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Perhubungan yang berkeinginan untuk menambah kemampuan kompetensi keteknisan
4. Sumber Daya Alam yang melimpah sangat memungkinkan untuk mendapat alokasi anggaran pembangunan Bidang Perhubungan secara proporsional
5. Peningkatan kebutuhan informasi dan teknologi, memacu untuk senantiasa berinovasi dalam upaya peningkatan pelayanan
6. Kondisi semangat untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kalimantan Timur
7. Tingkat kepedulian masyarakat Kalimantan Timur yang tinggi, akan pentingnya pemenuhan fasilitas perhubungan baik moda darat, laut dan udara
8. Peningkatan pelayanan transportasi darat yang bersifat missal dan ramah lingkungan untuk angkutan barang dan orang
9. Komitmen para pengambil keputusan terkait dengan SDGs dan Pengarustamaan Gender (PUG)
10. Adanya upaya harmonisasi regulasi oleh para pengambil kebijakan.
11. Adanya upaya penyelarasan program-prgram prioritas yang mendukung percepatan pembangunan Kawasan Khusus baik Kawasan Industri, Pusat Industri, Pusat Pemukiman dan Daerah Perbatasan, Pedalaman dan tertinggal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

1. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- a. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi meliputi rambu jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, RPPJ, dan lampu penerangan jalan
- b. Masih adanya kecenderungan meningkatnya kecelakaan di jalan;
- c. Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam berlalu lintas;
- d. Belum optimalnya pengawasan terhadap kendaraan yang over dimensi dan over loading (ODOL) di jalan;
- e. Masih minimnya tenaga ASN sektor perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang LLAJ dan bersertifikat PPNS LLAJ;
- f. Belum tersedianya Rencana Induk Transportasi Jalan Provinsi Kalimantan Timur;
- g. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian program Manajemen Rekayasa Lalu Lintas pada ruas Jalan Provinsi (Analisa Dampak Lalu Lintas);
- h. Belum optimalnya penggunaan angkutan umum;
- i. Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi para operator dalam pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) angkutan umum AKDP.

2. Bidang Pelayaran

- a. Belum optimalnya upaya pengawasan dan pengendalian kelayakan berlayar untuk kapal - kapal angkutan SDP;
- b. Masih terdapat ketidak samaan persepsi terkait regulasi penanganan kapal-kapal SDP;
- c. Minimnya ketersediaan fasilitas keselamatan berlayar di kapal-kapal yang berlayar di laut dan SDP;
- d. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap faktor keselamatan;
- e. Masih minimnya tenaga ASN sektor perhubungan yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang pelayaran dan bersertifikat PPNS SDP;
- f. Kurangnya sosialisasi / bimbingan keselamatan kepada para operator angkutan serta masyarakat pengguna jasa angkutan laut dan SDP;
- g. Masih adanya fasilitas dermaga sungai dan penyeberangan yang kurang layak dan tidak memadai sehingga perlu peningkatan/perbaikan sesuai dengan perkembangan transportasi saat ini;
- h. Belum optimalnya pelaksanaan SOP penanganan kapal-kapal Angkutan SDP di Provinsi Kalimantan Timur;
- i. Masih adanya pelabuhan yang belum diserahkan pengelolaannya sesuai kewenangan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- j. Rendahnya kesadaran Badan Usaha Kepelabuhanan, angkutan dan jasa terkait angkutan diperaikan untuk melaporkan setiap kegiatan usahanya;
- k. Lemahnya koordinasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan Bidang Pelayaran di Kalimantan Timur.

3. Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian

- a. Belum optimalnya simpul transportasi yang terintegrasi;
- b. Belum optimalnya sarana transportasi antar moda;
- c. Belum tersedianya dokumen rencana induk untuk terminal type B, dan Pelabuhan/Dermaga SDP;
- d. Belum tersedianya dokumen Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Belum optimalnya ketersediaan dokumen kajian lingkungan hidup untuk Terminal Type B dan Pelabuhan/dermaga SDP di Kaltim;
- f. Belum tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten/Kota se Kaltim;
- g. Belum optimalnya fasilitas Sistem Informasi dan Teknologi Perhubungan;
- h. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen sektor perhubungan di Kalimantan Timur.

4. UPTD Terminal Type B

- a. Belum tersedianya Rencana Induk Terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. Belum tersedianya perencanaan terminal terpadu di Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Belum tersedianya kajian lingkungan (UKL/UPL) Terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas terminal Type B di Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Kurangnya tenaga ASN yang memiliki kompetensi Teknis tentang pengelolaan terminal;
- f. Masih minimnya tenaga ASN di Terminal Tipe B yang memiliki kualifikasi teknis dan mempunyai kompetensi di bidang pelayaran dan bersertifikat PPNS;

- g. Belum terintegrasinya Sistem Informasi Angkutan antar Terminal Type B di Kalimantan Timur;
- h. Belum adanya Standar Pelayanan Operasional (SOP) di Terminal Type B;
- i. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk kebutuhan penyediaan fasilitas dan operasional di Terminal Type B;
- j. Belum adanya regulasi tentang legalitas aset Terminal Type B dari Pemerintah Kab/Kota ke Pemerintah Provinsi.
- k. Masih adanya lahan terminal yang dalam penguasaan masyarakat

3.1.1. Identifikasi Potensi Kewilayahan

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai beberapa potensi untuk dikembangkan antara lain :

1. Wilayah Bagian Barat dari Provinsi Kalimantan Timur dapat dikembangkan sebagai sentra produksi perkebunan, kehutanan dan pertanian bagi komoditi ekspor karena memiliki pangsa pasar yang luas dan nilai ekonomis tinggi. Komoditas tersebut meliputi hasil perkebunan tanaman keras, hasil hutan tanaman industri.
2. Wilayah Bagian Selatan dan Utara selain Kelapa Sawit dan Batu Bara, juga berpotensi dikembangkan wisata laut serta kawasan perikanan.
3. Sebagai kelengkapan dalam mendukung pengembangan potensi sumber daya alam yang ada di wilayah bagian Utara Prov. Kaltim ini, perlu dikembangkan beberapa prasarana perhubungan sebagai berikut :
 - a. Pelabuhan Laut Internasional Maloy Teluk Golok yang berlokasi di Kecamatan Sangkulirang Kutai Timur yang berfungsi sebagai outlet/inlet bagi komoditas Batu Bara

(Miang Besar) ; komoditas CPO/kelapa sawit dan turunannya (Teluk Golok) ; Ekspor Import untuk Cargo (Teluk Golok) ; Penumpang (Maloy eksisting) ; komoditi perikanan (di Bual-bual).

- b. Pusat-pusat industri pengolahan hasil perkebunan terutama palm oil industry, yang dapat menampung hasil; perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sendiri maupun yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, yaitu pembangunan pelabuhan di Karingau (TPK) dan Pelabuhan Buluminung Kab. Penajam Paser Utara.
- c. Industri semen Kalimantan Timur, untuk memasok kebutuhan semen di Provinsi Kalimantan Timur serta Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara akan dibangun Pelabuhan Laut di Teluk Sulaiman Kab. Berau.
- d. Pengembangan jaringan jalan baru yang dapat lebih luas mengakses ke sentra-sentra produksi hasil perkebunan kelapa sawit di wilayah timur dengan pusat industri pengolahannya yang lokasinya berdekatan dengan Pelabuhan Bulu minung, yang dimaksudkan juga untuk mengakomodasi kebutuhan pelayanan bagi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
- e. Pengembangan Pelabuhan Mantaritip di Kabupaten Berau lebih difokuskan pada kegiatan arus barang dan penumpang dari Pulau Jawa atau daerah lain serta untuk menampung arus kegiatan dari wilayah belakang Provinsi Kalimantan Utara.
- f. Pengembangan Bandara APT Pranoto Samarinda dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi pembukaan jalur penerbangan nusantara lainnya

atau ditingkatkan menjadi Bandara Internasional. Selain itu juga dilakukan pengembangan jalur penerbangan reguler intra kalimantan bagi 3 (tiga) Bandar Udara lainnya yaitu : Bandara Maratua di Kab. Berau (Destinasi Wisata Pulau Derawan dan sekitarnya) ; Bandara Melalan di Kab. Kutai Barat dan rencana pembangunan Bandara Long Bagun di Kab. Mahakam Hulu.

- g. Pengembangan intermoda transportasi regional kalimantan antara moda angkutan sungai, laut, kereta api, jalan raya dan udara. Bagian terpenting dalam pengembangan prasarana transportasi adalah pengembangan sistem jaringan prasarana atau simpul strategis yang perlu dikembangkan dalam rangka mencapai struktur tata ruang yang meliputi sistem jaringan transportasi jalan, sungai, Penyebarangan, laut, dan udara harus terintegrasi dalam satu simpul pengembangan transportasi yang direncanakan dapat menunjang pengembangan wilayah secara keseluruhan.

3.2.3. Identifikasi Tujuan Berdasarkan Permasalahan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- a. Pengembangan angkutan massal pada lintas Samarinda-Balikpapan ; Samarinda - Bontang - Sangatta - Berau (Kawasan SAMBOSABE)
- b. Meningkatkan kapasitas seat penumpang (dari MPU ke bus sedang/besar);
- c. Mengembangkan trayek angkutan bus Bandara APT. Pranoto Samarinda ke pusat-pusat bangkitan penumpang dan atau pusat-pusat industri;

- d. Mengembangkan pelayanan daerah terisolasi dengan angkutan perintis;
- e. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jalan Provinsi;
- f. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, pagar pengaman dan lain-lain) pada ruas jalan Provinsi;
- g. Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek antar Kota dalam Provinsi (AKDP);
- h. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi teknis dan tenaga PPNS Jalan;
- i. Tersedia Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan Provinsi Kalimantan Timur;
- j. Menurunnya angka kecelakaan baik kategori ringan, sedang dan atau berat;
- k. Tersedianya dokumen rencana induk/master plan LLAJ Prov. Kaltim;
- l. Menurunnya tingkat pelanggaran (ODOL) angkutan barang di jalan;
- m. Terpenuhinya pelayanan angkutan umum AKDP guna mendukung mobilitas masyarakat di Kalimantan Timur
- n. Terpenuhinya SPM angkutan umum AKDP di Kaltim;
- o. Terwujudnya sistem manajemen keselamatan (SMK) operator angkutan umum AKPD di Kaltim;
- p. Menurunnya tingkat kecelakaan angkutan di Jalan Provinsi;
- q. Terbangunnya terminal Type B di masing-masing Kab/Kota di Kalimantan Timur;
- r. Tercapainya target Capaian Kinerja Kepuasan Masyarakat pengguna Terminal type B di Kalimantan Timur.

2. Bidang Pelayaran

- a. Peningkatan pelayanan trayek angkutan penumpang dan barang pada daerah yang masih terisolasi dan pelayanan trayek angkutan barang;
- b. Peningkatan kelancaran dan keselamatan lalu lintas pada alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan;
- c. Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di wilayah Kaltim;
- d. Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari;
- e. Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari;
- f. Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- g. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi.
- h. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh perairan;
- i. Tersedianya pelabuhan pada setiap Ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif jalan;

- j. Terpenuhi standar keselamatan kapal yang berlayar diperairan daratan dengan ukuran 7 GT s/d 150 GT yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
- k. Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran 7 GT s/d 150 GT;
- l. Terbangunnya dermaga sungai Aji Imbut Kab. Kutai Kertanegara;
- m. Terbangunnya dermaga sungai Muara Kaman Kab. Kutai Kertanegara;
- n. Terbangunnya dermaga sungai Tabang Kab. Kutai Kertanegara;
- o. Peningkatan Pelabuhan Sungai Melak Kab. Kutai Barat;
- p. Peningkatan Pelabuhan Sungai Tering Kab. Kutai Barat;
- q. Peningkatan Pelabuhan Sungai Ujok Bilang Kab. Mahulu;
- r. Peningkatan Pelabuhan Sungai Long Pahangai Kab. Mahakam Hulu;
- s. Peningkatan Pelabuhan Sungai Senaken Tana Paser;
- t. Peningkatan Pelabuhan Sungai Meridan di PPU;
- u. Pembangunan Pelabuhan Sungai Tanjung Keramat Kab. Kutai Timur;
- v. Terlaksananya pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan oleh Pemerintah Daerah.

3. Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian

- a. Terbangunnya jaringan trase Kereta Api Umum dan Barang di Kalimantan Timur
- b. Terbangun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan

- c. Tersedianya System Informasi Manajemen Keterpaduan Moda/antar moda di Kalimantan Timur
- d. Terintegrasinya layanan terminal type di Kalimantan Timur secara on line
- e. Tersedianya Dokumen Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Regional
- f. Beroperasinya secara optimal pelabuhan pengumpan regional di Kalimantan Timur
- g. Tersedianya dokumen lingkungan di Pelabuhan Pengumpan Regional dan Terminal Type B se Kalimantan Timur

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, sesuai dengan janji-janji politik Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Timur Terpilih periode 2018-2023 maka visi dan misi dalam RPJMD 2019-2023 adalah :

3.2.1. Visi

“Berani Untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat”

3.2.2. Misi :

1. Berdaulat dalam pembangunan Sumber Daya Manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang Distabilitas
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan
4. Berdaulat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan

5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintah yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik

3.2.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Prov. Kaltim terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

Tabel. 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah (Berdasarkan Program Prioritas Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih 2019-2023)

Misi ke-3 : Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.

No	Program Prioritas Renstra SKPD	Implementasi Rencana Kegiatan	Faktor			
			Penghambat		Pendorong	
1	2	3	4		5	
1.	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	1. Pembinaan, pembangunan dan peningkatan pelabuhan	1.	Belum optimalnya layanan jasa kepelabuhanan TPK Balikpapan	1.	Terus ditingkatkannya upaya optimalisasi jasa kepelabuhanan di pelabuhan TPK Balikpapan, Maloy Kutim dan pelabuhan Pengumpuan Regional
		2. Pembinaan penyelenggaraan SDP dan pelabuhan rakyat	2.	Belum optimalnya layanan jasa kepelabuhanan Pelabuhan Maloy Kutai Timur	2.	Terus ditingkatkan fasilitas kepelabuhanan yang ada
		3. Pembinaan Badan Usaha dan Perizinan Angkutan Pelayaran	3.	Belum optimalnya layanan jasa kepelabuhanan pelabuhan pengumpan regional	3.	Terus ditingkatkan sosialisasi keselamatan dan audit sarana diperaian
			4.	Belum layaknnya fasilitas pelabuhan		
			5.	Masih tingginya angka kecelakaan di perairan		
			6.	Belum sadarnya masyarakat untuk menggunakan safety (Life Jacket) saat berlayar		

				7.	Belum optimalnya Audit Kelayakan Sarana Perairan		
2.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1.	Pengadaan fasilitas pengaman lalu lintas	1.	Belum adanya studi kebutuhan fasilitas kelengkapan jalan di Jln Provinsi Kaltim	1.	Akan disusun dokumen kebutuhan fasilitas kelengkapan jalan
		2.	Pembinaan Pelayanan Angkutan Jalan	2.	Masih terbatasnya jumlah rambu, marka, RPPJ, dan pagar pengaman	2.	Terus ditingkatkan jumlah rambu, marka, pagar, RPPJ
		3.	Pembinaan dan Pengendalian Keselamatan Sarana dan Prasarana Jalan	3.	Masih tingginya pelanggaran di jalan	3.	Terus diupayakan untuk menurunkan angka pelanggaran
				4.	Masih tingginya kecelakaan di jalan raya	4.	Terus diupayakan menurunkannya angka kecelakaan di jalan
				5.	Belum sinerginya pengurusan angkutan jalan (OSS)	5.	Terus disinergikan pengurusan angkutan jalan OSS
				6.	Belum optimalnya keikutsertaan Kab/Kota dalam kegiatan Pelajar Pelopor, AKUT dan WTN	6.	Terus diupayakan keikutsertakan kab/kota pada kegiatan Pelajar Pelopor, AKUT dan WTN
				7.	Belum optimalnya regulasi ASK	7.	Terus di optimalnya regulasi ASK
				8.	Belum optimalnya pelaksanaan audit sarana angkutan jalan	8.	Terus ditambah dengan Diklat tenaga Teknis yang ada
				9.	Rendahnya kuantitas tenaga teknis yang ada	9.	Terus dipotimalkan revisi regulasi ASK
				10.	Belum optimalnya pelaksanaan regulasi tentang ASK		
3.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1.	Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian	1.	Belum ada rencana induk jaringan kereta api kab/kota	1.	Terus diupayakan penyusunan dokumen rencana induk perkeretaapian Kab/Kota
		2.	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	2.	Belum ada dokumen lingkungan di terminal type B	2.	Akan disusun dokumen lingkungan hidup kawasan terminal type B
		3.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemadu Moda	3.	Belum adanya studi Pemadu Moda di Kaltim	3.	Akan disusun dokumen Rencana Induk Fasilitas Perhubungan baik darat, laut dan udara sesuai

						dengan kewenangan
4.	Program Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B	1.	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Type B Wilayah I	1.	Belum tuntasnya masalah Aset Terminal Type B (P3D)	1. Percepatan penyelesaian aset terminal Type B
		2.	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Type B Wilayah II	2.	Belum adanya dokumen Rencana Induk Terminal Type B	2. Akan disusunnya Dokumen Rencana Induk Terminal Type B
				3.	Belum jelasnya status lahan terminal	3. Percepatan penyelesaian serah terima lahan dari Kab/Kota ke Provinsi
				4.	Belum terintegrasinya antar Terminal Type B	4. Akan diintegrasikannya terminal Type B di Kaltim
				5.	Belum layaknya fasilitas terminal Type B	5. Terus ditingkatkan fasilitas terminal Type B yang ada

Misi 1 : Berdaulat dalam pembangunan SDM yang beraklaq mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas, serta

Misi 5 : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintah yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan publik

No	Program Prioritas Renstra SKPD	Implementasi Rencana Kegiatan		Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3		4	5
1	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		1. Masih rendahnya daya saing SDM	1. Terbatasnya rekrutemn ASN yg sesuai kompetensi
		2 Koordinasi dan konsultasi kelembagaan Pemda		2. Paradigma pelaksanaan Diklat	2. Terus ditingkatkan pemahaman pentingnya Diklat
				3. Persepsi tentang ketidak pastian pelaksanaan tugas dilingkungan Pemda	3. Optimalisasi kinerja ASN
				4. Lemahnya pembinaan beban kerja	4. Optimalisasi beban kerja sesuai ketentuan
					5. Re Strukturisasi

2	Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan Publik	1	Program pelayanan administrasi perkantoran	5. Belum optimalnya upaya Re harmonisasi regulasi 6. Minimnya tenaga PPNS LLAJ dan SDP 7. Tingginya angka penyalahgunaan Narkoba	Kelembagaan 6. Terus di pacu upaya me re harmonisasi regulasi keweangan pusat dan daerah 7. Pengiriman ASN ke Pusdik Reserse Mega Mendung 8. Terus ditingkatkan sosialisasi penyalahgunaan Narkoba
		2	Program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	1. Belum optimalnya pengelolaan asset 2. Masih rendahnya profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah	1. Terus ditingkatkan optimalisasi pengelolaan asset 2. Akan ditingkatkan profesionalisme ASN
		3	Program penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah	3. Belum optimalnya system administrasi kepegawaian 4. Masih adanya disharmonisasi peraturan / kebijakan antara pusat, provinsi, kab/kota 5. Kualitas pelayanan public masih belum memenuhi standart	3. Akan dioptimalkan system administrasi kepegawaian 4. Akan dilakukan keselarasan dan reharmoniasi regulasi pusat, provinsi, kab/kota 5. Akan ditingkatkan kualitas pelayanan public

				pelayanan minimal 6. Belum optimalnya system online Submission (OSS)	6. Akan dioptimalkan penyelenggaraan online single submission (OSS)
--	--	--	--	---	---

Tabel 3.2. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No.	Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
1	2	3	4	5
1	Kondisi pelabuhan/dermaga dan angkutan pelayaran yang tidak layak atau representatif lagi dengan perkembangan transportasi saat ini untuk meningkatkan ekonomi daerah	Kurangnya fasilitas pelabuhan/dermaga dan angkutan pelayaran	Minimnya kapasitas dan kualitas fasilitas pelabuhan/dermaga	Belum optimalnya kualitas pelayanan pelabuhan/dermaga laut, sungai, danau dan penyeberangan
		Banyaknya angkutan pelayaran yang tidak laik layar	Kurangnya fasilitas dan penerapan peraturan keselamatan angkutan pelayaran	
		Banyaknya badan Usaha pelayaran yang tidak taat peraturan	Rendahnya kesadaran badan usaha kepelabuhanan, angkutan perairan dan jasa terkait perizinan dan pelaporan kegiatan usahanya	
2	Angka kecelakaan/pelanggaran lalu lintas yang tinggi	Kurangnya ketersediaan fasilitas keselamatan jalan	Kurangnya penyediaan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan Provinsi meliputi rambu jalan, marka jalan, pagar pengaman jalan, RPPJ, lampu penerangan jalan dan lain-lain	Belum optimalnya kualitas pelayanan transportasi darat
		Banyaknya angkutan barang/penumpang yang melanggar peraturan lalu lintas	Kurangnya sosialisasi dan penegakan regulasi LLAJ atau pengawasan dan pengendalian angkutan jalan.	
		Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam memahami keselamatan berlalu lintas di jalan	Kurangnya sosialisasi keselamatan beralu - lintas di jalan	
3	Minimnya pelayanan antarmoda	Minimnya perencanaan simpul transportasi, masterplan dan lingkungan prasarana perhubungan	Belum tersedianya perencanaan antarmoda yang terintegrasi	Belum optimalnya pelayanan antar moda
			Belum tersedianya Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten/Kota se-Kaltim	
			Belum tersedianya Rencana Induk dan kajian lingkungan Terminal dan pelabuhan/dermaga SDP	
4	Berkurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum massal	Kurangnya kualitas pelayanan di terminal	Minimnya sarana dan prasarana terminal	Belum Optimalnya pelayanan terminal
5	Kurangnya kinerja pelayanan ASN Perhubungan	Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM perhubungan	Kurangnya jumlah ASN yang bersertifikasi teknis	Belum optimalnya kinerja pelayanan ASN perhubungan dan harmonisasi peraturan/kebijakan/standard.
			Kurang optimalnya harmonisasi peraturan/kebijakan antara pusat, provinsi dan kab/kota	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan aksesibilitas wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman	Peningkatan pelayanan dan fasilitas transportasi laut, sungai, danau & penyeberangan	Meningkatkan jumlah, kapasitas dan kualitas pelabuhan/ dermaga laut dan SDP yang dibangun/ dikembangkan	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan
				Meningkatkan standarisasi kelaikan sarana dan prasarana angkutan di perairan laut dan SDP		Pembinaan Penyelenggaraan SDP dan Pelayanan Rakyat
				Meningkatkan kualitas/jumlah badan usaha dan perizinan angkutan pelayanan yang dibina		Pembinaan Badan Usaha dan Perizinan Angkutan Pelayanan
		Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat	Peningkatan pelayanan dan fasilitas kelengkapan transportasi darat	Meningkatkan kelengkapan fasilitas keselamatan jalan	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Pengadaan Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas Jalan
				Meningkatkan pembinaan pelayanan angkutan jalan		Pembinaan Pelayanan Angkutan Jalan
				Meningkatkan pengendalian keselamatan sarana dan prasarana jalan serta mutu kondisi sarana angkutan jalan		Pembinaan dan Pengendalian Keselamatan Sarana dan Prasarana Jalan
			Menyediakan rencana pengembangan titik-titik simpul layanan transportasi dan dokumen lingkungan perhubungan	Mewujudkan lintasan/trase kereta api	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian
				Mengembangkan perumusan kebijakan lingkungan perhubungan		Perumusan Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
				Mengembangkan jumlah perencanaan dan pembangunan fasilitas pemadu moda		Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemadu Moda
		Peningkatan pelayanan dan fasilitas prasarana terminal tipe B		Membangun/ Mengembangkan terminal type B Wilayah I (Samarinda, Bontang, Sangatta dan Berau)	Program Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Type B Wilayah I
				Membangun/Mengembangkan terminal type B Wilayah II (Tenggarong, PPU, Tanah Grogot, Kutai Barat dan Mahulu)		Pembangunan dan Peningkatan Terminal Type B Wilayah II
		Peningkatan profesionalisme/kapasitas dan integritas aparatur pemerintah		Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
				Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
			Optimalisasi sinergitas dan harmonisasi peraturan /kebijakan pusat, provinsi dan kab/kota	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
				Meningkatkan mutu dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
		Peningkatan kualitas pelayanan publik				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
						Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
						Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

3.3. HASIL TELAAHAN TERHADAP RENSTRA KEMENTERIAN/ LEMBAGA

Berdasarkan Renstra Kementerian Perhubungan dapat diuraikan arah kebijakannya sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Rencana Strategis 2015-2019
Kementerian Perhubungan

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Menurunnya angka kecelakaan	Meningkatkan keselamatan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi • Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha • Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi • Penguatan kelembagaan
2.	Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi	Meningkatkan keamanan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi • Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute • Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi • Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi

4.	Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan komponen sesuai dengan kebutuhan	Memenuhi SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Man Power Planning SDM transportasi • Menyusun Training Needs Analysis (TNA) SDM transportasi • Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi • Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan • Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi
5.	Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan	Meningkatkan kualitas penelitian transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti • Peningkatan sinergitas antara Balitbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian • Peningkatan kerjasama penelitian antar lembaga riset dan industri • Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran Badan Litbang Perhubungan
6.	Meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan <i>good governance</i>	Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Penuntasan agenda reformasi birokrasi • Integrasi sistem manajemen dan pelaporan kinerja & keuangan • Penyederhanaan perijinan dan penerapan e-government di lingkungan Kemenhub
7.	Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas penetapan dan implementasi regulasi sektor transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan arah / kebutuhan kerangka regulasi • Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya. • Percepatan penyusunan peraturan perundang – undangan • Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih

8.	Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi	Menerapkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim • Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi terbarukan • Penerapan sistem manajemen transportasi dalam rangka peningkatan penggunaan angkutan umum
9.	Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan <i>Clean Governance</i>	Pelaksanaan pengawasan intern yang berintegritas, profesional dan amanah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan peran Inspektur Jenderal sebagai consultant dan <i>quality assurance</i> • Peningkatan kualitas hasil pengawasan serta SDM pengawasan
10.	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda / multimoda	Meningkatkan kapasitas, konektivitas / aksesibilitas antar wilayah & keterpaduan antarmoda / multimoda	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana • Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan <i>outcomes</i> • Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda • Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui swasta • Penyiapan konsep & implementasi angkutan laut dari barat ke timur Indonesia
11.	Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di Wilayah Timur Indonesia (WTI)	Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana di daerah rawan bencana perbatasan, terluar, terpencil, dan khususnya di Wilayah Timur Indonesia (WTI)	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi guna memperkecil kesenjangan antar wilayah timur dan barat • Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi • Penyediaan sarana angkutan keperintisan di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan rawan bencana

12.	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	Mengembangkan sistem angkutan umum massal dengan orientasi kepada angkutan bus maupun rel dengan fasilitas alih moda terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan konsep angkutan massal perkotaan yang lebih matang dan komprehensif • Pengembangan BRT • Pembangunan dan pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel • Penyediaan dana subsidi / PSO yang terarah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan
13.	Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan	Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dalam sistem manajemen perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan sistem informasi lalu lintas secara <i>real time</i>. Penerapan ATCS dan <i>Virtual Mobility</i> • Penerapan sistem tiket elektronik yang terintegrasi

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan.

Tabel. 3.4.

**Permasalahan Pelayanan
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan
Peserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menurunnya angka kecelakaan	Kurang memadainya sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan	Kurangnya pemeliharaan sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan	Terus dikembangkannya sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan

2.	Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi	Kurang memadainya penanganan gangguan keselamatan transportasi	Kurang memadainya penanganan gangguan keselamatan transportasi	Terus meningkatkan penanganan gangguan keselamatan transportasi
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Belum optimalnya kinerja pelayanan transportasi	Belum optimalnya kinerja pelayanan transportasi	Terus meningkatkan kinerja pelayanan transportasi
4.	Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan komponen sesuai dengan kebutuhan	Perlunya peningkatan kualitas SDM dalam bidang perhubungan baik dalam jumlah dan komponen sesuai kebutuhan	Kurangnya SDM dalam bidang perhubungan baik dalam jumlah dan komponen sesuai kebutuhan	Terus dikembangkan SDM bidang perhubungan
5.	Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan	Perlunya penelitian bidang perhubungan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan	Kurangnya penelitian bidang perhubungan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan	Terus dikembangkannya penelitian bidang perhubungan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan
6.	Meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan <i>good governance</i>	Perlunya mewujudkan <i>good governance</i> dalam bidang pelayanan perhubungan	Kurangnya kinerja dalam bidang pelayanan perhubungan	Terus ditingkatnya kinerja dalam bidang pelayanan perhubungan untuk mewujudkan <i>good governance</i>
7.	Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan	Belum optimalnya penetapan regulasi dalam kebijakan masalah perhubungan baik berupa Perda ataupun Pergub	Belum optimalnya penetapan regulasi dalam kebijakan masalah perhubungan baik berupa Perda ataupun Pergub	Perlu dilakukan kajian secara terperinci untuk menetapkan regulasi dalam implementasi kebijakan perhubungan di daerah
8.	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan meningkatnya	Belum optimalnya penanganan dampak emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Belum optimalnya penanganan dampak emisi	Terus meningkatkan dan mengoptimalkan

	penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi	pada sektor transportasi di daerah	Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor transportasi di daerah	penanganan dampak emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada sektor transportasi di daerah
9.	Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan Clean Governance	Perlunya meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan bidang perhubungan	Kurang maksimalnya pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan bidang perhubungan	Terus ditingkatkannya pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan untuk mewujudkan <i>Clean Governance</i>
10.	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda / multimoda	Masih belum maksimalnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda / multimoda	Masih belum maksimalnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda / multimoda	Terus meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda / multimoda
11.	Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di Wilayah Timur	Belum tersedianya layanan transportasi khusus pada daerah rawan bencana	Belum tersedianya layanan transportasi khusus pada daerah rawan bencana	Perlu adanya layanan transportasi pada daerah rawan bencana
12.	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	Belum maksimalnya layanan angkutan massal diperkotaan	Kurang maksimalnya layanan angkutan massal perkotaan	Terus ditingkatnya pelayanan angkutan massal perkotaan
13.	Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan	Kurangnya pengembangan teknologi informasi dalam bidang transportasi	Kurangnya pengembangan teknologi informasi dalam bidang transportasi	Terus dikembangkan teknologi informasi dalam bidang transportasi

3.4. TELAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi RTRW sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	RTRW Terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pembangunan terminal penumpang Tipe B di Long Laham Kec. Long Bagun Kab. Mahulu	Belum terbangunnya terminal Tipe B di Kab. Mahakam Hulu	Belum terbangunnya terminal Tipe B di Kab. Mahakam Hulu	Terus dikembangkan peningkatan simpul transportasi guna mendukung kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2.	Pembangunan terminal penumpang Tipe Kab. Kutai Barat	Belum terbangunnya terminal penumpang Tipe B di Kab. Kutai Barat	Belum terbangunnya terminal penumpang Tipe B di Kab. Kutai Barat	Terus dikembangkan peningkatan simpul transportasi guna mendukung kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
3.	Pembangunan terminal penumpang Terpadu di Ibukota Provinsi	Belum terbangunnya terminal penumpang terpadu di Ibukota Provinsi Kaltim	Belum terbangunnya terminal penumpang Terpadu di Kota Samarinda	Terus dikembangkan peningkatan simpul transportasi guna mendukung kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
4.	Pengembangan dan peningkatan Terminal Type B sei kunjang, lempake, sangatta, Bontang, Tenggarong, Tana Paser	Belum optimalnya fasilitas Terminal Type B sei kunjang, lempake, sangatta, Bontang, Tenggarong, Tana Paser	Belum optimalnya fasilitas Terminal Type B sei kunjang, lempake, sangatta, Bontang, Tenggarong, Tana Paser	Terus dikembangkan peningkatan simpul transportasi guna mendukung kelancaran dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat
5.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan antar dan atau	Belum optimalnya fasilitas pelabuhan penyeberangan	Belum optimalnya fasilitas pelabuhan penyeberangan di Provi. Kaltim	Terus ditingkatkannya fasilitas pelabuhan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Timur

	dalam provinsi	di Prov. Kaltim		
6.	Pengembangan jaringan penyeberangan lintas antar Kabupaten/Kota antar dan atau dalam Provinsi	Belum optimalnya jaringan angkutan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Timur	Belum optimalnya jaringan angkutan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Timur	Terus dikembangkannya jaringan angkutan penyeberangan guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat
7.	Peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan di Kaltim	Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Timur	Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Timur	Terus ditingkatkannya sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan di Provinsi Kalimantan Timur
8.	Pembangunan, peningkatan dan pengembangan prasarana pelabuhan Maloy	Kurang memadainya prasarana di pelabuhan Maloy	Kurang memadainya prasarana di pelabuhan Maloy	Terus ditingkatkannya prasarana pelabuhan di Maloy
9.	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul Balikpapan	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kota Balikpapan	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kota Balikpapan	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kota Balikpapan
10.	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul Tanjung Laut dan Loak Tuan Kota Bontang	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan Tanjung Laut dan Loak Tuan Kota Bontang	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan Tanjung Laut dan Loak Tuan Kota Bontang	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan Tanjung Laut dan Loak Tuan Kota Bontang
11.	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul Kenyamukan di Kab. Kutai Timur	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan Kenyamukan di Kab. Kutai Timur	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan Kenyamukan di Kab. Kutai Timur	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan Kenyamukan di Kab. Kutai Timur
12.	Pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpul Tanjung Redeb, Mantaritim dan rencana Teluk Sulaiman di Kab.	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan Tanjung Redeb, Mantaritim dan	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan Tanjung Redeb, Mantaritim dan Teluk Sulaiman di Kab.	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan di Kabupaten Berau

	Berau	Teluk Sulaiman di Kab. Berau	Berau	
13.	Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau di Alur Pelayaran Sungai Mahakam	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan Sungai di Alur Pelayaran Sungai Mahakam	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan pelabuhan Sungai di Alur Pelayaran Sungai Mahakam Prov. Kaltim	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan pelabuhan Sungai dan Danau pada Alur Pelayaran Sungai Mahakam
14.	Pembangunan dan pengembangan Bandara Long Apari Kab. Mahakam Hulu	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Bandara Long Apari Kab. Mahulu	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Bandara Long Apari Kab. Mahulu	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan Bandara Long Apari Kab. Mahulu
15.	Pembangunan dan pengembangan Bandara Ujoq Bilang Kab. Mahakam Hulu	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Bandara Ujoq Bilang Kab. Mahulu	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Bandara Ujoq Bilang Kab. Mahulu	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan Bandara Ujoq Bilang Kab. Mahulu
16.	Pembangunan dan pengembangan Bandara Datah Dawai Kab. Mahakam Hulu	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Bandara Datah Dawai Kab. Mahulu	Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan Bandara Dawai Kab. Mahulu	Terus ditingkatkan pembangunan dan pengembangan Bandara Dawai Kab. Mahulu
17.	Pembangunan Terminal Type A Samarinda Seberang	Belum optimalnya fasilitas prasarana terminal Type A Kota Samarinda	Belum optimalnya fasilitas prasarana terminal Type A Kota Samarinda	Terus dikembangkan fasilitas prasarana terminal Type A Kota Samarinda
18.	Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan perkeretaapian berupa pembangunan jalan kereta api dan rencana pembangunan stasiun kereta api	Belum terbangunnya sistem jaringan perkeretaapian di Kalimantan Timur	Belum terbangunnya sistem jaringan perkeretaapian di Kalimantan Timur	Terus dikembangkannya pembangunan sistem jaringan perkeretaapian di Kalimantan Timur
19.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Bus	Belum tersediannya Sarana dan	Belum tersediannya Sarana dan	Terus ditingkatkannya pembangunan Sarana dan Prasarana Bus <i>Rapid</i>

	<i>Rapid Transit</i> (BRT) di Kawasan Perkotaan Kota Balikpapan	Prasarana Bus <i>Rapid Transit</i> (BRT) di Kota Balikpapan	Prasarana Bus <i>Rapid Transit</i> (BRT) di Kota Balikpapan	<i>Transit</i> (BRT) di Kota Balikpapan
20.	Pengembangan sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder)	Belum tersedianya sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder) guna mendukung operasional BRT di Kota Balikpapan	Belum tersedianya sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder) guna mendukung operasional BRT di Kota Balikpapan	Terus dikembangkannya sistem dan jaringan pengumpan (angkutan feeder) guna mendukung operasional BRT di Kota Balikpapan

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Perhubungan, visi, misi dan program Kepala Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perhubungan, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perhubungan dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan pelabuhan/dermaga laut, sungai, danau dan penyeberangan.

- a. Pemerintah daerah secara bertahap akan melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur khususnya pelabuhan/dermaga
- b. Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya penguatan sektor ekonomi daerah dan pelayanan yang optimal terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi khususnya untuk aksesibilitas dan konektivitas ke pusat produksi, kawasan industri dan pusat permukiman.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dilaksanakan secara komprehensif dari sisi pemenuhan infrastruktur, keselamatan dan pembinaan badan usaha.

2. Peningkatan kualitas pelayanan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- a. Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi darat, pemerintah daerah terus berupaya secara bertahap menerapkan prinsip – prinsip 5 (lima) Pilar Aksi Keselamatan Jalan dalam rangka mendukung Rencana Umum Nasional Keselamatan
- b. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan dengan meningkatkan fasilitas keselamatan jalan, meningkatkan standard keselamatan kendaraan angkutan umum dan melakukan pembinaan terhadap badan usaha jasa transportasi.

3. Peningkatan pelayanan Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian

- a. Peningkatan kemudahan dan kenyamanan pelayanan antarmoda merupakan tuntunan dari semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi yang efektif dan efisien
- b. Peningkatan pelayanan antarmoda di Kalimantan Timur guna mewujudkan antarmoda yang terintegrasi dengan pepadu moda dimulai dengan perencanaanyang matang sehingga dapat diperoleh informasi simpul – simpul transportasi yang terintegrasi dan memadai.

4. Peningkatan pelayanan terminal.

- a. Pengelolaan Terminal Tipe Boleh pemerintah provinsi merupakan amanat UU 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah
- b. Pelayanan terminal menjaditolok ukur keberhasilan pemerintah dalam tugas dan fungsinya sehingga peningkatan pelayanan

terminal wajib dilakukan dengan strategi peningkatan pelayanan dan fasilitas prasarana terminal tipe B.

5. Peningkatan kinerja pelayanan ASN perhubungan dan harmonisasi peraturan/kebijakan/standard.

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sektor perhubungan dan pembenahan peraturan/kebijakan/regulasi di sektor perhubungan adalah faktor penting dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan sektor perhubungan
- b. Peningkatan kualifikasi teknis dan kompetensi SDM perhubungan
- c. Harmonisasi peraturan/kebijakan akan dapat mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi di Kalimantan Timur.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1. Tujuan

1. Meningkatkan aksesibilitas wilayah

Indikator : Jumlah Penumpang yang terlayani (orang) dan Jumlah barang (ton)

4.1.2. Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah pembangunan perhubungan di Kalimantan Timur sebagai berikut :

1. Meningkatnya infrastruktur perhubungan yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas kepusat produksi, kawasan industri dan pusat permukiman.

Indikator : Prosentase pergerakan sarana transportasi(%)

2. Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transpotasi Darat

Indikator: Pertumbuhan kelaikan sarana prasarana lalu lintas jalan

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah dinas perhubungan, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1 (TC.25)
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun Dasar (2018)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1. Meningkatkan aksesibilitas wilayah		Jumlah Penumpang (org) dan barang (ton) yang terlayani	10.392.536 (orang) 325.051.663 (ton)	10.705.000 (orang) 334.805.000 (ton)	11.026.150 (orang) 344.850.000 (ton)	11.356.200 (orang) 355.200.000 (ton)	11.700.000 (orang) 365.900.000 (ton)	12.050.000 (orang) 376.900.000 (ton)
	1. Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung Aksesibilitas dan Konektivitas kePusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman	Prosentase pergerakan sarana transportasi (%)	25%	30%	35%	40%	45%	50%
	2. Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transpotasi Darat	Pertumbuhan kelaikan sarana prasarana LLJ (%)	50 %	50 %	60 %	70 %	80 %	85 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

5.1.1. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur adalah dengan :

1. Peningkatan pelayanan dan fasilitas transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan;
2. Peningkatan pelayanan dan fasilitas kelengkapan transportasi darat;
3. Menyediakan rencana pengembangan titik-titik simpul layanan transportasi dan dokumen lingkungan perhubungan;
4. Peningkatan pelayanan dan fasilitas prasarana terminal tipe B;
5. Peningkatan profesionalisme/kapasitas dan integritas aparatur pemerintah;
6. Optimalisasi sinergitas dan harmonisasi peraturan /kebijakan pusat, provinsi dan kab/kota;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

5.1.2. Kebijakan Perangkat Daerah :

1. Meningkatkan jumlah, kapasitas dan kualitas pelabuhan/ dermaga laut dan SDP yang dibangun/ dikembangkan;
2. Meningkatkan standarisasi kelaikan sarana dan prasarana angkutan di perairan laut dan SDP;
3. Meningkatkan kualitas/jumlah badan usaha dan perizinan angkutan pelayaran yang dibina;
4. Meningkatkan kelengkapan fasilitas keselamatan jalan;
5. Meningkatkan pembinaan pelayanan angkutan jalan;

6. Meningkatkan pengendalian keselamatan sarana dan prasarana jalan serta mutu kondisi sarana angkutan jalan;
7. Mewujudkan lintasan/trase kereta api;
8. Mengembangkan perumusan kebijakan lingkungan perhubungan;
9. Mengembangkan jumlah perencanaan dan pembangunan fasilitas pepadu moda;
10. Membangun/ Mengembangkan terminal type B Wilayah I (Samarinda, Bontang, Sangatta dan Berau);
11. Membangun/Mengembangkan terminal type B Wilayah II (Tenggarong, PPU, Tanah Grogot, Kutai Barat dan Mahulu);
12. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran;
13. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;
14. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;
15. Meningkatkan mutu dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah.

Keterkaitan antara Visi dan misi Gubernur /Wakil Gubernur Terpilih 2019 – 2023 dengan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 5.1. dibawah ini

Tabel 5.1. (TC.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
(kesesuaian Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur terhadap Perangkat Daerah)

Visi : Berani Untuk Kalimantan Timur yang Berdaulat				
Misi 3 : Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
1. Meningkatkan aksesibilitas wilayah	1. Meningkatkan infrastruktur perhubungan yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas ke pusat produksi, kawasan industry dan pusat permukiman	1. Peningkatan pelayanan dan fasilitas transportasi laut, sungai, danau & penyeberangan	1.	Meningkatkan jumlah, kapasitas dan kualitas pelabuhan/ dermaga laut dan SDP yang dibangun/ dikembangkan
			2.	Meningkatkan standarisasi kelaikan sarana dan prasarana angkutan di perairan laut dan SDP
			3.	Meningkatkan kualitas/jumlah badan usaha dan perizinan angkutan pelayaran yang dibina
	2. Meningkatnya kelancaran dan keselamatan transportasi darat	2. Peningkatan pelayanan dan fasilitas kelengkapan transportasi darat	1.	Meningkatkan kelengkapan fasilitas keselamatan jalan
			2.	Meningkatkan pembinaan pelayanan angkutan jalan
			3.	Meningkatkan pengendalian keselamatan sarana dan prasarana jalan serta mutu kondisi sarana angkutan jalan

		Menyediakan rencana pengembangan titik-titik simpul layanan transportasi dan dokumen lingkungan perhubungan	1.	Mewujudkan lintasan/trase kereta api
			2.	Meningkatkan pembinaan pelayanan angkutan jalan
			3.	Meningkatkan pengendalian keselamatan sarana dan prasarana jalan serta mutu kondisi sarana angkutan jalan
		Peningkatan pelayanan dan fasilitas prasarana terminal tipe B	1.	Membangun/ Mengembangkan terminal type B Wilayah I (Samarinda, Bontang, Sangatta dan Berau)
			2.	Membangun/Mengembangkan terminal type B Wilayah II (Tenggarong, PPU, Tanah Grogot, Kutai Barat dan Mahulu)
		Peningkatan profesionalisme/kapasitas dan integritas aparatur pemerintah	1.	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
			2.	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
		Optimalisasi sinergitas dan harmonisasi peraturan /kebijakan pusat, provinsi dan kab/kota	1.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
		Peningkatan kualitas pelayanan publik	1.	Meningkatkan mutu dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN

6.1. Program Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode 2019 – 2023, rencana Program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Prov. Kaltim sebanyak 8 (delapan) program dan 18 (delapan belas) kegiatan yaitu :

1. Program Pembangunan Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP dengan 3 kegiatan :
 - 1) Kegiatan pembinaan, pembangunan dan peningkatan pelabuhan
 - 2) Kegiatan pembinaan, penyelenggaraan SDP dan pelayaran rakyat
 - 3) Kegiatan pembinaan badan usaha dan perizinan angkutan pelayaran
2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan 3 kegiatan :
 - 1) Kegiatan pengadaan fasilitas pengamanan lalu lintas jalan
 - 2) Kegiatan pembinaan angkutan jalan
 - 3) Kegiatan pembinaan dan pengendalian keselamatan sarana dan prasarana jalan
3. Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan 3 kegiatan :
 - 1) Kegiatan pengembangan prasarana dan fasilitas perkeretaapian
 - 2) Kegiatan perumusan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan
 - 3) Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pemuatan moda
4. Program Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B dengan 2 kegiatan :
 - 1) Kegiatan pembangunan dan peningkatan type B wilayah I
 - 2) Kegiatan pembangunan dan peningkatan terminal type B wilayah II
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 1 kegiatan :
 - 1) Kegiatan pelaksanaan administrasi perkantoran

6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 2 kegiatan :
 - 1) Kegiatan penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana
 - 2) Kegiatan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana
7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dengan 2 kegiatan :
 - 1) Kegiatan koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah
 - 2) Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
8. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah dengan 2 kegiatan :
 - 1) Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran
 - 2) Kegiatan penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Sedangkan program prioritas pendukung program Program Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih 2019 – 2023 adalah:

1. Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP
2. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pada bagian ini ditampilkan secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, seperti tabel berikut :

Tabel. 6.1(TC.27)
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan
Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2019-2023.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel 7.1 sebagai berikut :

Tabel. 7.1 (TC.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 0)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Jumlah Penumpang yang terlayani (orang) dan Jumlah barang (ton)	10.392.536 (orang)	10.705.000 (orang)	11.026.150 (orang)	11.356.200 (orang)	11.700.000 (orang)	12.050.000 (orang)	12.050.000 (orang)
		325.051.663 (ton)	334.805.000 (ton)	344.850.000 (ton)	355.200.000 (ton)	365.900.000 (ton)	376.900.000 (ton)	376.900.000 (ton)
2	Prosentase pergerakan sarana transportasi (%)	25%	30%	35%	40%	45%	50%	50%
3	Prosentase Pertumbuhan Kelainan Saran dan Prasarana Lalu Lintas Jalan (%)	50 %	50 %	60 %	70 %	80 %	85 %	85 %

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan :

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023 menggambarkan perencanaan 5 (lima) tahun kedepan sebagai langkah pedoman pentahapan rencana indikatif program, kegiatan dan pembiayaan pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan referensi dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta bahan untuk pemantauan serta evaluasi kinerja pelayanan dan rencana pembangunan Bidang Perhubungan di Provinsi Kalimantan Timur yang fungsinya sebagai pedoman dalam penjabaran program kerja 5 Tahun sebagai instrument pencapaian Sasaran dan Tujuan RPJMD 2019 – 2023 dan Visi Misi Gubernur/Wakil Terpilih 2019 – 2023.

8.2. Saran :

1. Dokumen Renstra agar dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
2. Dokumen Renstra agar dijadikan pedoman dalam pengukuran kinerja Tahunan;
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang telah tertuang dalam Dokumen Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan IKU Bidang – Bidang;
4. Untuk keselarasan dan sinergitas pencapaian Visi dan misi Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dan dalam upaya mengimbangi kedinamisan tuntutan masyarakat, Dokumen Renstra dapat dilakukan review minimal 1 Tahun Renstra berjalan, menyesuaikan kebijakan dan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih 2019 – 2023.

TABEL 6.1 (T-C.27)																				
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR																				
Misi/Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Misi 3 : Berdaulat dalam memenuhi infrastruktur kewilayahan																				
Meningkatnya Tujuan : aksesibilitas wilayah				Jumlah Penumpang yang terlayani (orang) dan Jumlah barang (ton)	10.392.536 (orang) & 325.051.663 (ton)	10.705.000 (orang) & 334.805.000 (ton)	41,780,436,500	11.026.150 (orang) & 344.850.000 (ton)	78,000,000,000	11.356.200 (orang) & 355.200.000 (ton)	121,000,000,000	11.700.000 (orang) & 365.900.000 (ton)	98,000,000,000	12.050.000 (orang) & 376.900.000 (ton)	98,000,000,000	12.050.000 (orang) & 376.900.000 (ton)	436,780,436,500	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur	
	Sasaran 1	Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan yang Mendukung : Aksesibilitas dan Konektivitas ke Pusat Produksi, Kawasan Industri dan Pusat Permukiman		Prosentase pergerakan sarana transportasi (%)	25%	30%	27,364,516,500	35%	44,450,000,000	40%	67,359,330,000	45%	54,659,330,000	50%	54,659,330,000	50%	248,492,506,500	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur	
			2.09.16	Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP	Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP (Unit/%)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (83%)	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (83%)	3,037,846,500	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (85%)	30,200,000,000	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (88%)	40,609,330,000	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (90%)	27,909,330,000	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (90,42%)	27,909,330,000	10 Dermaga SDP - 12 Pelabuhan Laut (90,42%)	129,665,836,500	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.09.16.01	Pembinaan, Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan	Jumlah dan Progres Pelabuhan/Dermaga/Fasilitas yang dibangun (Unit/%)	1 Unit	1 Unit	2,314,146,500	1 Unit	28,200,000,000	2 Unit	38,309,330,000	2 Unit	25,609,330,000	1 Unit	25,609,330,000	8 Unit	120,042,136,500	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.09.16.02	Pembinaan Penyelenggaraan SDP dan Pelayaran Rakyat	Persentase sarana dan prasarana angkutan perairan memenuhi standar kelaikan berlayar (%)	75%	80%	551,800,000	81.5%	1,500,000,000	85%	2,000,000,000	91%	2,000,000,000	95%	2,000,000,000	95%	8,051,800,000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.09.16.03	Pembinaan Badan Usaha dan Perizinan Angkutan Pelayaran	Jumlah Badan Usaha Angkutan Pelayaran yang Dibina (Badan Usaha)	20 Badan Usaha	100 Badan Usaha	171,900,000	100 Badan Usaha	500,000,000	100 Badan Usaha	300,000,000	100 Badan Usaha	300,000,000	100 Badan Usaha	300,000,000	520 Badan Usaha	1,571,900,000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.09.17	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah simpul transportasi yang terintegrasi dan terpadu	0 Simpul	1 Simpul	21,109,320,000	2 Simpul	11,000,000,000	3 Simpul	22,500,000,000	1 Simpul	22,500,000,000	0 Simpul	22,500,000,000	7 Simpul	99,609,320,000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.09.17.01	Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian	Jumlah lintasan/trase kereta api yang direncanakan (Lintasan)	0 Lintasan	0 Lintasan	156,000,000	2 Lintasan	500,000,000	3 Lintasan	1,000,000,000	1 Lintasan	1,000,000,000	0 Lintasan	1,000,000,000	6 Lintasan	3,656,000,000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.09.17.02	Perumusan Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah perencanaan kebijakan pengembangan bidang perhubungan (Perencanaan)	0 Perencanaan	1 Perencanaan	548,160,000	2 Perencanaan	3,000,000,000	2 Perencanaan	1,500,000,000	3 Perencanaan	1,500,000,000	2 Perencanaan	1,500,000,000	10 Perencanaan	8,048,160,000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.09.17.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemadu Moda	Jumlah perencanaan angkutan pemadu moda (Perencanaan)	0 Perencanaan	3 Perencanaan	20,405,160,000	2 Perencanaan	7,500,000,000	2 Perencanaan	20,000,000,000	2 Perencanaan	20,000,000,000	2 Perencanaan	20,000,000,000	11 Perencanaan	87,905,160,000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.09.18	Program Pembangunan dan Pengembangan Terminal Tipe B	Jumlah Penumpang Terminal Yang Terlayani (penumpang)	500,000	650,000	3,217,350,000	700,000	3,250,000,000	750,000	4,250,000,000	800,000	4,250,000,000	1,000,000	4,250,000,000	1,000,000	19,217,350,000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.09.18.01	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B Wilayah I yang dibangun/ditingkatkan	Jumlah Terminal Tipe B Wilayah I yang dibangun/ditingkatkan	0 Terminal	2 Terminal	2,091,277,500	1 Terminal	2,112,500,000	1 Terminal	2,762,500,000	1 Terminal	2,762,500,000	0 Terminal	2,762,500,000	5 Terminal	12,491,277,500	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.09.18.02	Pembangunan dan Peningkatan Terminal Tipe B Wilayah II yang dibangun/ditingkatkan	Jumlah Terminal Tipe B Wilayah II yang dibangun/ditingkatkan	0 Terminal	1 Terminal	1,126,072,500	1 Terminal	1,137,500,000	2 Terminal	1,487,500,000	1 Terminal	1,487,500,000	1 Terminal	1,487,500,000	6 Terminal	6,726,072,500	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
	Sasaran 2	Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Transportasi Darat			Pertumbuhan Kelaikan Sarana Prasarana Lalu Lintas Jalan (%)	50%	50%	12,788,556,000	60%	31,800,000,000	70%	51,890,670,000	80%	41,590,670,000	85%	41,590,670,000	85%	179,660,566,000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.09.15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kasus)	854	683	4,375,614,000	598	21,800,000,000	512	39,790,670,000	427	29,590,670,000	342	29,590,670,000	342	125,147,624,000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
			2.09.15.01	Pengadaan Fasilitas Pengamanan Lalu Lintas Jalan	Panjang jalan yang dipasang fasilitas keselamatan jalan (km)	286 km	120 km	3,169,054,000	120 km	18,600,000,000	120 km	34,790,670,000	120 km	24,590,670,000	120 km	24,590,670,000	886 km	105,741,064,000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur
		2.09.15.02	Pembinaan Pelayanan Angkutan Jalan	Jumlah badan usaha angkutan umum yang dibina (Badan Usaha)	10 Badan Usaha	24 Badan Usaha	642,960,000	24 Badan Usaha	1,700,000,000	24 Badan Usaha	3,000,000,000	24 Badan Usaha	3,000,000,000	24 Badan Usaha	3,000,000,000	130 Badan Usaha	11,342,960,000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur	
		2.09.15.03	Pembinaan dan Pengendalian Keselamatan Sarana dan Prasarana Jalan	Persentase sarana angkutan darat yang laik uji dan prasarana yang laik fungsi (%)	40%	42.5%	563,600,000	50%	1,500,000,000	55%	2,000,000,000	65%	2,000,000,000	72.5%	2,000,000,000	72.5%	8,063,600,000	Dinas Perhubungan	Kalimantan Timur	

		2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	100%	100%	2,894,520,000	100%	3,000,000,000	100%	3,000,000,000	100%	3,000,000,000	100%	3,000,000,000	100%	14,894,520,000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.09.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	2,894,520,000	12 Bulan	3,000,000,000	12 Bulan	3,000,000,000	12 Bulan	3,000,000,000	12 Bulan	3,000,000,000	60 Bulan	14,894,520,000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	4 Unit	4 Unit	2,331,190,000	4 Unit	2,700,000,000	4 Unit	3,700,000,000	4 Unit	3,700,000,000	4 Unit	3,700,000,000	4 Unit	16,131,190,000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.09.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang laik (%)	50%	80%	1,174,030,000	85%	1,200,000,000	90%	1,200,000,000	95%	1,200,000,000	100%	1,200,000,000	100%	5,974,030,000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.09.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Kebersihan Gedung Kantor dan Taman, Pemeliharaan Gedung, Peralatan & Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Operasional & Jabatan (%)	70%	80%	1,157,160,000	85%	1,500,000,000	90%	2,500,000,000	95%	2,500,000,000	100%	2,500,000,000	100%	10,157,160,000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	25%	2,476,400,000	30%	3,000,000,000	35%	4,000,000,000	40%	4,000,000,000	50%	4,000,000,000	50%	17,476,400,000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.09.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Publikasi, Tersedianya Makan dan Minum Terkait Pelaksanaan Pekerjaan dan Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi (%)	100%	100%	1,429,400,000	100%	2,000,000,000	100%	3,000,000,000	100%	3,000,000,000	100%	3,000,000,000	100%	12,429,400,000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.09.09.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhinya Kualifikasi SDM Perhubungan (%)	20%	25%	1,047,000,000	30%	1,000,000,000	35%	1,000,000,000	40%	1,000,000,000	50%	1,000,000,000	50%	5,047,000,000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.09.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	69	70.5	710,832,000	71	1,300,000,000	71.5	1,400,000,000	72.5	1,300,000,000	73.5	1,300,000,000	73.5	6,010,832,000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.09.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Tersusunnya Renja, RKA, DPA	5 Dokumen	5 Dok	560,832,000	5 Dok	1,000,000,000	5 Dok	1,200,000,000	5 Dok	1,100,000,000	5 Dok	1,100,000,000	25 Dok	4,960,832,000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.09.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pengendalian Evaluasi Kegiatan (Dokumen)	20 Dokumen	20 Dok	150,000,000	20 Dok	300,000,000	20 Dok	200,000,000	20 Dok	200,000,000	20 Dok	200,000,000	100 Dok	1,050,000,000	Dinas Perhubungan	Samarinda

							1,627,364,000		1,750,000,000		1,750,000,000		1,750,000,000		1,750,000,000		8,627,364,000		
		2.09.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	100%	100%	1,075,964,000	100%	1,100,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,100,000,000	100%	1,100,000,000	100%	5,475,964,000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.09.07.01	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	12 Bulan	12 Bulan	1,075,964,000	12 Bulan	1,100,000,000	12 Bulan	1,100,000,000	12 Bulan	1,100,000,000	12 Bulan	1,100,000,000	60 Bulan	5,475,964,000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.09.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	3 Unit	3 Unit	413,200,000	4 Unit	450,000,000	4 Unit	450,000,000	4 Unit	450,000,000	4 Unit	450,000,000	4 Unit	2,213,200,000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.09.08.01	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang laik (%)	50%	80%	200,000,000	85%	200,000,000	90%	200,000,000	95%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	1,000,000,000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.09.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Terlaksananya Kebersihan Gedung Kantor dan Taman, Pemeliharaan Gedung, Peralatan & Perlengkapan Kantor, Pemeliharaan Kendaraan Operasional & Jabatan (%)	70%	80%	213,200,000	85%	250,000,000	90%	250,000,000	95%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	1,213,200,000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.09.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	50%	55%	138,200,000	60%	200,000,000	65%	200,000,000	70%	200,000,000	75%	200,000,000	75%	938,200,000	Dinas Perhubungan	Samarinda
		2.09.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Publikasi, Tersedianya Makan dan Minum Terkait Pelaksanaan Pekerjaan dan Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi (%)	100%	100%	138,200,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	938,200,000	Dinas Perhubungan	Samarinda